

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DESA/KELURAHAN
TANGGUH BENCANA DI PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

**PEDOMAN PELAKSANAAN
DESA/KELURAHAN
TANGGUH BENCANA (DESTANA)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| Daftar Isi | 2 |
| Daftar Tabel | 4 |
| Daftar Gambar | 4 |
| Daftar Lampiran | 4 |
| Daftar Istilah | 5 |
| Bab I Pendahuluan | |
| 1.1. Latar Belakang | 8 |
| 1.2. Tujuan | 9 |
| 1.3. Ruang Lingkup | 9 |
| 1.4. Dasar Hukum dan Acuan Teknis | 9 |
| Bab II Gambaran Umum Kebencanaan Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
| 2.1. Kondisi Kebencanaan | 11 |
| 2.1.1 Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi NTB | 11 |
| 2.1.2 Bahaya (Hazard) | 11 |
| 2.1.3 Kerentanan (Vulnerability) | 13 |
| 2.1.4 Kapasitas | 14 |
| 2.2. Risiko Bencana Daerah | 15 |
| Bab III Konsep Destana | |
| 3.1. Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Perka BNPB No 1 Tahun 2012) | 17 |
| 3.2. Penilaian Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Berdasarkan SNI | 20 |
| 3.2.1 Dasar Penilaian | 20 |
| 3.2.2 Kerangka Kerja Penilaian | 20 |
| 3.2.3 Tujuan dan Manfaat | 21 |
| 3.3. Keterkaitan Destana dengan Program Sejenis Lainnya | 22 |
| Bab IV Proses Pengembangan Destana | |
| 4.1. Pengenalan Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | 25 |
| 4.2. Penyusunan Dokumen Kejadian Risiko Bencana dan Peta Risiko Bencana | 27 |
| 4.3. Pengembangan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat | 33 |
| 4.4. Penyusunan Rencana Evakuasi Desa | 34 |
| 4.5. Penyusunan Rencana Kontijensi | 35 |
| 4.6. Penguatan Forum Desa/Kelurahan untuk Pengurangan Risiko Bencana dan pembangunan di Masyarakat | 36 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 4.7 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana | 38 |
| 4.8 | Integrasi RPB dan RAK ke Dalam Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan | 40 |
| 4.9 | Penyusunan Perencanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program kepada Masyarakat Umum | 40 |
| 4.10 | Pembentukan Relawan | 44 |
| 4.11 | Simulasi Sistem peringatan Dini, Rencana Evakuasi dan Rencana Kontijensi | 45 |
| 4.12 | Monitroing dan Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana | 46 |
| Bab V Strategi Pelaksanaan Destana | | |
| 5.1. | Gambaran Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana | 49 |
| 5.2. | Pembelajaran Praktek Destana | 50 |
| | 5.2.1 Berbasis Masyarakat | 50 |
| | 5.2.2 Kemitraan Multi Pihak (KMP) | 51 |
| | 5.2.3 Pendayagunaan dan Perluasan “ <i>Existing Condition</i> ” | 52 |
| | 5.2.4 Berorientasi pada “Keberlanjutan” (Pelebagaan) | 52 |
| 5.3. | Strategi Percepatan Pengembangan Destana | 53 |
| Bab VI Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | | |
| 6.1. | Instrumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 55 |
| 6.2. | Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 56 |
| Bab VII Penutup | | 58 |
| LAMPIRAN | | |
| 1. | Data Desa/Keluarahan Tangguh Bencana Hingga 2021 | 59-70 |
| 2. | 2.1. Peran Para Pihak dalam Pelaksanaan Destana | 71-84 |
| | 2.2. Keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Ketangguhan Desa berdasarkan Urusan | 85-90 |
| 3. | Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Tenaga Fasilitator Penilai Destana | 91-98 |

DAFTAR TABEL

- 2.1. Sejarah Kejadian Bencana NTB Tahun 1999-2019
- 2.2. Potensi Bahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2.3. Potensi Multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2.4. Potensi Kerentanan Multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2.5. Potensi kerentanan multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 5.1. Instrumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembantuan dan Pengembangan Destana
- 5.2. *Form* Monitoring dan Evaluasi

DAFTAR GAMBAR

- 2.1. Grafik Potensi Multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2.2. Strategis peningkatan indeks kapasitas di Kabupaten/Kota

LAMPIRAN

- I. Data Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Hingga 2021
- II. 2.1. Peran Para Pihak dalam Pelaksanaan Destana
2.2. Keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Ketangguhan Desa berdasarkan Urusan
- III. Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Tenaga Fasilitator Penilai Destana

DAFTAR ISTILAH

- Bahaya (Hazard)* : peristiwa atau kondisi fisik yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada manusia seperti luka-luka, kerusakan properti dan infrastruktur, kerusakan lingkungan, gangguan terhadap kegiatan ekonomi atau segala kerugian dan kehilangan yang dapat terjadi (FEMA, 1997).
- Corporate Social Responsibility (CSR)* : sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan, untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya.
- Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)* : sebuah aplikasi yang dibangun atas kerjasama BNPB, BAPPENAS, DEPAGRI, UNDP, dan DFID, dengan tujuan mendukung BNPB dalam meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah, mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan laporan kejadian bencana secara tepat dan cepat, serta memberikan informasi yang lengkap dan aktual pada semua pihak yang terkait dengan unsur penanggulangan bencana baik di Indonesia maupun negara asing melalui fasilitas global.
- Desa Siaga Aktif* : Desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Upayakesehatanbersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya yang buka setiap hari danberfungsisebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencanadankegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan PerilakuHidupBersihdan Sehat (PHBS).
- Destana* : desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Perka BNPB No.1 Tahun 2012).
- Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)* : memberikan informasi terkait dengan bahaya, Kerentanan, dan kapasitas serta potensi dampak kerugian akibat bencana. Masing-masing daerah memiliki karakteristik ancaman bencana yang berbeda-beda.
- GEDSI* : Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.
- Kampung Siaga Bencana (KSB)* : model pendekatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat untuk merubah pola pikir dan pola tindak masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- Kapasitas* : kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu.

- Kerentanan* : sejauh mana suatu sistem atau unit cenderung mengalami kerusakan karena pengaruh dari bencana.
- Monitoring dan Evaluasi* : merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program.
- Pengembangan Destana* : salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama.
- Peringatan dini* : serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- Program Kampung Iklim (ProKlim)* : program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
- Pentahelix* : multipihak merupakan unsur kolaborasi yang menggabungkan berbagai pihak diantaranya, Academy, Business, Community, Government, and Media (ABCGM).
- Rencana evakuasi* : dokumen pendahuluan yang memuat penjelasan kondisi di daerah, strategi dan prosedur evakuasi, peta-peta evakuasi, serta memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk tindakan-tindakan yang perlu dilakukan lebih lanjut untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap tsunami lokal.
- Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB)* : bahan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- Rencana Kontinjensi* : proses identifikasi dan penyusunan rencana ke depan yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak pernah terjadi.
- Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)* : rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun 5 (lima) tahun pada suatu daerah.

Standard Operating Procedure (SOP) : rangkaian prosedur atau panduan pelaksanaan bagi seluruh SDM yang terlibat dalam operasional sebuah organisasi, instansi maupun perusahaan.

Standar Nasional Indonesia (SNI) : standar yang berlaku secara nasional di negara Indonesia, disusun dan dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, jenis bencana alam terdiri dari gempa bumi, letusan gunung api, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko bencana (KRB) tahun 2020-2024, bahwa di Indonesia terdapat bencana gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, gelombang pasang/badai dan abrasi. Berdasarkan kondisi di Nusa Tenggara Barat terdapat tiga belas jenis ancaman bencana.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Tujuan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana adalah untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Bencana antar unsur *pentahelix* (pemerintah, sektor swasta, kelompok masyarakat, media massa dan akademisi).

Berdasarkan target pembentukan Destana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB (RPJMD) adalah sebanyak 434 Desa/kelurahan. Keberadaan Desa Tangguh Bencana di Nusa Tenggara Barat adalah sebanyak 192 desa/kelurahan tersebar di sepuluh Kabupaten/Kota, dan enam puluh tujuh kecamatan. Adapun sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta NGO. Berdasarkan hal tersebut, dalam pedoman ini diharapkan dapat menjawab permasalahan masyarakat terkait penanggulangan bencana secara cepat dan mandiri.

1.2 Tujuan

Pedoman umum ini disusun untuk:

1. Memberikan panduan bagi Perangkat Daerah yang terlibat dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat hingga Kabupaten/Kota;
2. Memberikan acuan bagi penguatan koordinasi/sinergi bagi para pihak dan pemangku kepentingan Pengurangan Risiko Bencana berbasis desa atau komunitas;
3. Mewujudkan desa/kelurahan tangguh bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3 Ruang Lingkup

Penetapan program unggulan di provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan berdasarkan pertimbangan empiris frekuensi kejadian bencana dan potensi desa sebagai aset besar dalam membangun wilayah. Secara regulasi Program Desa Tangguh Bencana berjalan beriringan sesuai dengan strategi yang menjadi prioritas di dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044. Melalui "Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020", RIPBN 2020-2044 berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang akan berakhir pada tahun 2025 mendatang, persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) 2015-2030 serta Kerangka Sendai untuk Pembangunan Resiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*) 2015-2030.

Pedoman ini berlaku untuk pengembangan desa/kelurahan tangguh di kabupaten/kota yang rawan bencana. Pedoman juga dapat digunakan sebagai acuan dalam memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana ke dalam program-program lain di tingkat desa/kelurahan, yang dilakukan oleh pemerintah maupun mitra-mitra non-pemerintah.

1.4 Dasar Hukum dan Acuan Teknis

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Destana Bencana;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.1. Kondisi Kebencanaan

2.1.1. Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi NTB

Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah akan menjadi dasar dalam pengkajian risiko bencana di wilayah tersebut. Catatan sejarah kejadian bencana beserta besaran dampak yang ditimbulkan dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap risiko bencana terkait dengan kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan sehingga dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan terhadap risiko bencana tersebut. Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Sejarah Kejadian Bencana NTB Tahun 1999 - 2019

| No. | Kejadian | Jumlah Kejadian | Meninggal | Luka-luka | Hilang | Mengungsi | Rumah Rusak Berat | Rumah Rusak Ringan | Kerusakan Lahan (Ha) |
|-----|------------------------------|-----------------|------------|--------------|----------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Banjir | 249 | 41 | 2.158 | 4 | 78.986 | 3.981 | 1.771 | 17.362,63 |
| 2 | Cuaca Ekstrem | 120 | 10 | 86 | - | 1.496 | 2.130 | 791 | - |
| 3 | Gelombang Ekstrem dan Abrasi | 19 | - | 1 | - | 4.455 | 279 | 64 | - |
| 4 | Gempa Bumi | 37 | 574 | 2.254 | - | 454.007 | 82.706 | 35.598 | - |
| 5 | Kebakaran Hutan dan Lahan | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kekeringan | 97 | - | - | - | - | - | - | 51.345,00 |
| 7 | Letusan Gunung Api | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Tanah Longsor | 30 | 36 | 51 | - | 328 | 108 | 6 | 110,00 |
| | Total | 562 | 661 | 4.550 | 4 | 539.272 | 89.204 | 38.230 | 68.817,63 |

2.1.2. Bahaya (Hazard)

Gambaran kondisi bahaya (*hazard*) di wilayah Provinsi NTB dapat disajikan berdasarkan Dokumen Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020. Berdasarkan hasil pengkajian bahaya terhadap potensi bencana yang terdapat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi bahaya dengan indeks bahaya pada kelas tinggi untuk jenis bencana

banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, likuefaksi dan pandemi COVID-19. Sedangkan indeks bahaya dengan kelas sedang tidak teridentifikasi di wilayah ini. Di wilayah ini tidak terdapat potensi bahaya dengan kelas rendah.

Penjabaran kajian bahaya setiap potensi bencana memperlihatkan hasil yang berbeda-beda. Secara umum rekapitulasi hasil pengkajian bahaya setiap kabupaten/kota menentukan hasil kajian tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rangkuman hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk setiap bencana di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Potensi Bahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat

| No. | Jenis Bencana | Bahaya | |
|-----|------------------------------|-----------|--------|
| | | Luas (Ha) | Kelas |
| 1. | Banjir | 355.064 | Tinggi |
| 2. | Banjir Bandang | 81.891 | Tinggi |
| 3. | Cuaca Ekstrim | 180.176 | Tinggi |
| 4. | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | 48.483 | Tinggi |
| 5. | Gempa Bumi | 2.010.383 | Tinggi |
| 6. | Kebakaran Hutan dan Lahan | 2.010.746 | Tinggi |
| 7. | Kekeringan | 2.008.595 | Tinggi |
| 8. | Letusan Gunung Api | 62.460 | Tinggi |
| 9. | Tanah Longsor | 1.054.079 | Tinggi |
| 10. | Tsunami | 73.538 | Tinggi |
| 11. | Epidemi dan Wabah Penyakit | 2.005.920 | Tinggi |
| 12. | Likuefaksi | 191.832 | Tinggi |
| 13. | Pandemi COVID-19 | 2.004.658 | Tinggi |

Sumber : Hasil Analisis Kajian Resiko Bencana (KRB) Tahun 2020

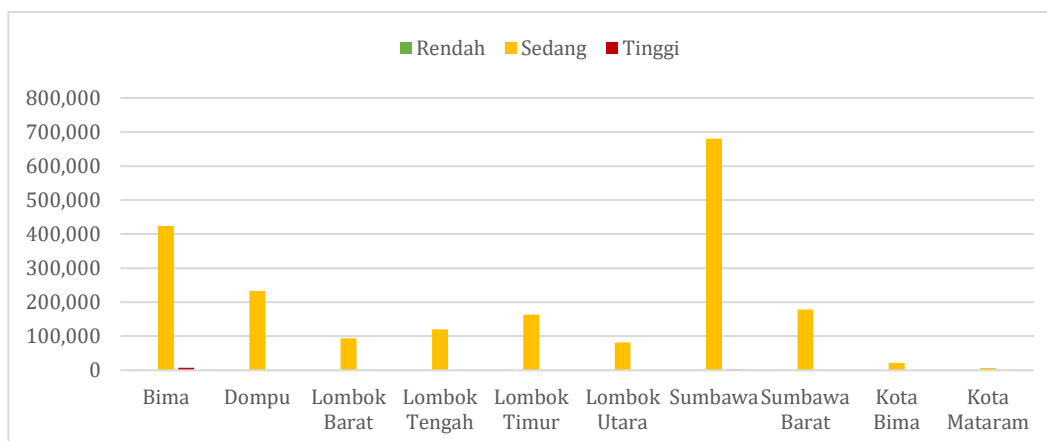
Berdasarkan Hasil analisis luas multibahaya, didapatkan Nilai potensi luas bahaya sebagai berikut:

Tabel 2.3 Potensi Multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat

| No. | Kabupaten/Kota | Multi Bahaya | | | | Kelas |
|-----------|---------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Luas (Ha) | | | | |
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | Total | |
| A. | Kabupaten | | | | | |
| 1. | Bima | 21 | 424.068 | 6.828 | 430.917 | Sedang |
| 2. | Dompu | 2 | 232.567 | 642 | 233.211 | Sedang |
| 3. | Lombok Barat | 8 | 94.179 | 258 | 94.445 | Sedang |
| 4. | Lombok Tengah | 4 | 119.629 | 39 | 119.672 | Sedang |
| 5. | Lombok Timur | 21 | 163.503 | 779 | 164.303 | Sedang |
| 6. | Lombok Utara | 0 | 81.850 | 1.000 | 82.850 | Sedang |
| 7. | Sumbawa | 9 | 679.989 | 1.364 | 681.362 | Sedang |
| 8. | Sumbawa Barat | 6 | 178.149 | 171 | 178.326 | Sedang |
| B. | Kota | | | | | |
| 1. | Kota Bima | 3 | 21.149 | 116 | 21.268 | Sedang |
| 2. | Kota Mataram | 0 | 5.839 | 331 | 6.170 | Tinggi |
| | Provinsi NTB | 74 | 2.000.922 | 11.528 | 2.012.524 | Tinggi |

Sumber : Hasil Analisis KRB Tahun 2020

Gambar 2.1. Grafik Potensi Multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat



2.1.3. Kerentanan (Vulnerability)

Kajian kerentanan dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kajian kerentanan ditentukan berdasarkan komponen sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen tersebut dikelompokkan dalam 2 (dua) indeks kerentanan yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian.

Komponen sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan menjadi dasar penentuan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian untuk menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian dikaji terhadap 13 jenis ancaman bencana di Provinsi NTB. Ke 13 potensi jenis bencana tersebut adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, likuefaksi, dan pandemi Covid-19. Adapun hasil kajian kerentanan multibahaya dari 10 kab/kota di Provinsi NTB Tahun 2020 oleh BNPB seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Potensi kerentanan multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat

| No. | Kab/Kota | Multi kerentanan | | | | Kelas |
|-----|---------------|------------------|--------|--------|---------|--------|
| | | Luas (ha) | | | | |
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | Total | |
| 1. | Bima | 307.876 | 4.048 | 0 | 311.924 | Sedang |
| 2. | Dompu | 159.551 | 2.355 | 0 | 161.906 | Sedang |
| 3. | Lombok Barat | 80.670 | 5.177 | 0 | 85.847 | Sedang |
| 4. | Lombok Tengah | 95.656 | 9.967 | 0 | 105.623 | Sedang |
| 5. | Lombok Timur | 121.144 | 8.599 | 0 | 129.743 | Sedang |
| 6. | Lombok Utara | 65.462 | 1.739 | 1 | 67.202 | Rendah |
| 7. | Sumbawa | 549.048 | 5.695 | 0 | 554.743 | Sedang |
| 8. | Sumbawa Barat | 166.769 | 1.302 | 0 | 168.071 | Sedang |
| 9. | Kota Bima | 14.453 | 1.255 | 0 | 15.708 | Sedang |

Bencana, dan Desa Tangguh Bencana menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan karena penanganan tematik ini sekaligus menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi NTB (Destana).

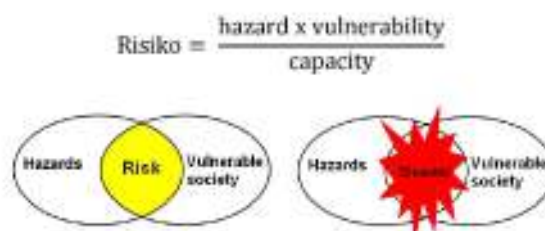


Terlihat bahwa prioritas 1, Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan dan prioritas 4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana. Pada prioritas 1 terdapat 7 indikator yang hampir seluruhnya telah dilaksanakan seperti pembentukan BPBD, Forum PRB, Perda tentang PB, dan kebijakan daerah lainnya terkait dengan PB. Sedangkan prioritas 4 yang terdiri dari 4 indikator yaitu penataan ruang berbasis PRB, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana, dan Desa Tangguh Bencana menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan karena penanganan tematik ini sekaligus menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi NTB (Destana).

2.2. Risiko Bencana Daerah

Risiko bencana dapat diuraikan sebagai fungsi dari bahaya (hazard) dan kerawanan (vulnerability), yang dapat dikombinasikan dengan kemampuan untuk mengatasi bencana (coping capacity). Secara sederhana, risiko dapat diformulasikan sebagai berikut (Peraturan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman umum Pengkajian Risiko Bencana) :



Memperhatikan kondisi bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang telah diuraikan diatas, tingkat risiko bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 7 tahun (2015 s/d 2021) sebagai berikut:



Sumber : IRBI Tahun 2021

Secara grafis menunjukkan tingkat risiko bencana Provinsi NTB mengalami penurunan secara simultan dari tahun ke tahun.

BAB III

KONSEP DESTANA

Destana (Desa/Kelurahan tangguh bencana) merupakan istilah program dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai salah satu upaya Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Konsep Destana tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Selain pendekatan upaya PRBBK dari BNPB terdapat program sejenis dari beberapa Kementerian dan Lembaga, diantaranya (1) Kementerian Kesehatan melalui program Desa/Kelurahan Siaga Aktif, yang konsepnya tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif; (2) Kementerian Sosial melalui program Kampung Siaga Bencana, yang konsepnya tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 693); (3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Program Kampung Iklim (Proklim) yang konsepnya mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim; (4) Palang Merah Indonesia (PMI) melakukan pembentukan SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat).

3.1. Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Perka BNPB No 1 Tahun 2012)

Dalam pasal 1 Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012, Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan panduan bagi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Pengertian dari Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.

Tujuan khusus pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah:

- 1) Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak merugikan bencana;
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;

- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
- 4) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
- 5) Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Desa/Kelurahan tangguh bencana akan memiliki komponen sebagai berikut:

1. Legislasi: penyusunan peraturan desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat Desa.
2. Perencanaan: Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa, yang meliputi: rencana kontijensi bila menghadapi ancaman tertentu, dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (Pengurangan Risiko Bencana.menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
3. Kelembagaan: Pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana.
4. Pendanaan: Rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD kabupaten/kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan).
5. Pengembangan kapasitas: Pelatihan, pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: Kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan resiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh bencana antara lain:

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender dalam program.
2. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitas eksternal yang seminimum mungkin.
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian, lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat Desa/ Kelurahan.
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan kerentanan warga.
6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko dan transfer risiko.
9. Pemaduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan demi keberlanjutan.
10. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Prinsip-prinsip program Destana sebagai berikut:

1. Bencana adalah urusan bersama.
2. Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.
3. Pemenuhan Hak Masyarakat
4. Masyarakat Menjadi Pelaku Utama.
5. Dilakukan Secara Partisipatoris.
6. Mobilisasi Sumberdaya local
7. Inklusif
8. Berlandaskan Kemanusiaan
9. Keadilan dan Kesetaraan Gender.
10. Keberpihakan Pada Kelompok Rentan

11. Transparansi dan Akuntabilitas.
12. Kemitraan
13. Multi ancaman

3.2. Penilaian Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Berdasarkan SNI

3.2.1. Dasar Penilaian

Penilaian desa/kelurahan merupakan perangkat alat hitung ketangguhan desa melalui indikator-indikator dan komponen yang telah disusun. Perangkat tersebut berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8357 : 2017, tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana. Dengan penerapan SNI Desa dan kelurahan tangguh bencana, diharapkan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana tersebut dapat secara nyata berkontribusi dalam penurunan risiko bencana termasuk dampak perubahan iklim melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan pelibatan langsung masyarakat termasuk didalamnya kelompok rentan dan kelompok marginal lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perangkat tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam menilai upaya pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim, di tingkat desa/kelurahan.

Perangkat penilaian ini menilai 5 komponen, terdiri dari komponen 1: kualitas dan akses layanan dasar, serta komponen 2: dasar sistem penanggulangan bencana. Kedua komponen tersebut merupakan indikator dasar / pondasi, seperti termaktub dalam SNI, untuk memastikan usaha-usaha penguatan ketangguhan dapat berjalan dengan baik. Komponen berikutnya, komponen 3: pengelolaan risiko bencana; komponen 4: kesiapsiagaan darurat, dan komponen 5: kesiapsiagaan pemulihan. Ketiga komponen ini merupakan representasi proses untuk mewujudkan indikator hasil dalam SNI. Oleh karenanya, komponen 1 dan 2 menjadi dasar bahwa komponen berikutnya dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak.

3.2.2. Kerangka Kerja Penilaian

Penilaian ketangguhan bencana menjadi salah satu fokus penting bersamaan meningkatnya usaha peningkatan ketangguhan bencana menyusul tingginya jumlah kejadian bencana berskala katastrofik (merenggut nyawa dan harta benda dalam jumlah sangat besar) di seluruh dunia pada dua dekade terakhir ini. Penilaian ketangguhan bencana bertujuan menghasilkan data dasar (baseline) tentang aspek-aspek yang mempengaruhi ketangguhan bencana pada tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Hasil penilaian

digunakan untuk landasan pengambilan keputusan tindakan meningkatkan ketangguhan bencana serta memonitor kemajuannya.

Kerangka kerja penilaian ini mengadopsi standar-standar ketangguhan bencana desa dan kelurahan pada SNI 8357:2017 serta mengadaptasi model DROP (Disaster Resilience of Place). Pilihan ini didasarkan pada rekomendasi ahli. DROP juga telah diadopsi dan diadaptasi di beberapa negara lain. Model tersebut mengasumsikan bahwa sistem alam berinteraksi dengan sistem sosial kemudian menciptakan kerentanan dan sekaligus ketangguhan bencana yang melekat (inheren) pada komunitas tersebut. Kerentanan inheren ini berupa nilai kemampuan suatu populasi bersiap untuk menanggapi dan pulih dari bencana, sedangkan nilai ketangguhan merupakan karakteristik komunitas yang mungkin menguatkan atau melemahkan kapasitasnya untuk mengurangi bahaya, mempersiapkan, menangani, dan memulihkan diri dari dampak bencana, kerentanan dan ketangguhan ini diasumsikan sudah ada sebelum bencana.

Model DROP memiliki kerangka yang komprehensif untuk menilai ketangguhan bencana masyarakat secara menyeluruh serta dapat menunjukkan dengan tepat komponen spesifik yang dapat meningkatkan atau mengurangi ketahanan bencana. Selanjutnya, DROP memungkinkan kita memahami dan membandingkan pola ketangguhan bencana masyarakat secara spasial.

3.2.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan

- 1) Pendidikan dan penyadaran risiko bencana pada masyarakat dan semua pihak
- 2) Menyediakan data dasar (base line) ketangguhan bencana di unit pemerintahan terkecil Republik Indonesia
- 3) Mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah

Manfaat

- 1) Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Bencana
 - a. Masyarakat desa/kelurahan memahami tingkat ketangguhan bencananya
 - b. Ketersediaan data untuk melakukan upaya peningkatan ketangguhan desa/kelurahan
- 2) Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan
 - a. Pemerintah desa/kelurahan memahami upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketangguhan.

- b. Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki data dasar untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan dasar
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki data dasar dalam penyusunan rencana pembangunan
- 3) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota
- a. Ketersediaan data evaluatif program-program pembangunan daerah
 - b. Ketersediaan data dasar untuk bahan menyusun program pembangunan daerah
- 4) Bagi Organisasi/Lembaga PB
- a. Ketersediaan data dasar untuk pengembangan program ketangguhan masyarakat
 - b. Ketersediaan data dasar untuk melakukan penelitian
- 5) Bagi lembaga usaha akan melakukan PB
- a. Ketersediaan data untuk menyusun program CSR/Donasi meningkatkan ketangguhan desa/kelurahan
 - b. Lembaga usaha yang berada di desa/kelurahan memahami risiko bencana yang mengancam keberlangsungan bisnisnya.
- 6) Bagi Lembaga Pendidikan dan Penelitian
- Ketersediaan data untuk bahan menyusun penelitian.

3.3. Keterkaitan Destana dengan Program Sejenis Lainnya

Secara garis besar, berdasarkan pedoman masing-masing program, kesamaan dan perbedaan konsep DESTANA, KSB, PROKLIM dan Desa/Kelurahan Siaga Aktif dapat dilihat pada matriks berikut:

| Uraian | Destana | KSB | Proklim | Desa Siaga Aktif |
|------------|--|---|--|---|
| PENGERTIAN | Desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan | Wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana | program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian LHK dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan ketahanan iklim, menurunkan emisi atau meningkatkan serapan gas rumah kaca | Desa/Kelurahan yang penduduknya: 1. dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Poskesdes atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut 2. mengembangkan UKBM dan melaksanakan survailans |

| Uraian | Destana | KSB | Proklim | Desa Siaga Aktif |
|------------|--|--|---|--|
| | | | (GRK) serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah | berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan PHBS. |
| WILAYAH | Desa/Kelurahan | Kecamatan/ Kelurahan/De sa/ Dusun | Kelurahan/Desa/ Dusun | Desa/Kelurahan |
| KOMPONEN | Legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, penyelenggaraan penanggulangan bencana | Direktori Penanggulangan Bencana, SOP, Gardu Sosial, Lumbung Sosial, Tenaga Terlatih dalam PB, Pemutakhiran data terkait PB, Pemutakhiran data demografi | upaya adaptasi, upaya mitigasi dan aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal | Pelayanan kesehatan dasar, Pemberdayaan masyarakat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |
| LEGISLASI | Peraturan Desa/Kelurahan | Ditetapkan Bupati/Walikota/Dinas Sosial/Camat | Ditetapkan Kepala desa/Lurah | Peraturan Desa/Kelurahan atau Peraturan Bupati/Walikota |
| KELEMBAGAN | Forum PRB, Tim Siaga Bencana | Masyarakat Peduli Bencana), TKSB (Tim Kampung Siaga Bencana) | Kelompok Kerja | Forum, Posyandu, UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) |
| TINGKATAN | Pratama, Madya, Utama | - | Pratama, Madya, Utama, Lestari | Pratama, Madya, Purnama, Mandiri |

Pada dasarnya, konsep keempat program tersebut memiliki kesamaan tujuan yakni meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam issue kebencanaan. Khusus untuk Desa dan Kelurahan Siaga Aktif stressingnya pada layanan kesehatan sedangkan Proklim menitikberatkan kepada bencana hidro meteorologi sebagai dampak dari perubahan iklim. Kesemuanya juga

menggunakan pendekatan berbasis masyarakat sehingga mengedepankan kesadaran masyarakat dan partisipasi Masyarakat. memastikan keberlanjutan, serta kejelasan dukungan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota, Provinsi, Pusat (K/L).

Desa/Kelurahan di NTB yang sudah menginisiasi ataupun pembentukan Siaga Aktif, KSB, dan Proklim dapat dinilai tingkat ketangguhannya sebagai DESTANA dengan menggunakan standar SNI 8357:2017. Melalui proses penilaian tersebut dapat direkomendasikan aksi-aksi prioritas untuk meningkatkan tingkatannya dari DESTANA pratama ke Madya, ataupun Madya ke Utama.

BAB IV

PROSES PENGEMBANGAN DESTANA

Pembentukan Destana merupakan sebuah proses berkelanjutan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat. Pembentukan Destana dibagi menjadi 12 tahapan dimana masing-masing tahapan memiliki output yang diharapkan dan dijelaskan juga langkah-langkah dan tahapan pelaksanaannya.

4.1. Pengenalan Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Pengenalan Destana dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kapasitas untuk menjadi wakil dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat seperti perangkat Desa, kelompok profesi, kelompok rentan, perempuan dan kelompok penyandang disabilitas. Tujuan pelibatan keterwakilan kelompok ini adalah untuk membangun kesepahaman dan menangani program Destana.

Output Yang dihasilkan:

1. Pembentukan kelompok Kerja
2. Pembuatan profil desa dilengkapi dengan ancaman bahaya yang ada

Tahapan Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Kerja:

1. Memetakan dan mengidentifikasi perwakilan warga Desa dengan memperhatikan:
 - a. Keterwakilan organisasi kemasyarakatan, seperti Forum PRB, kelompok relawan kelompok tani, PKK, Karang Taruna, kelompok kesenian, dll
 - b. Keterwakilan kelompok profesi, seperti pedagang, nelayan, ternak, guru/PNS, dll.
 - c. Keterwakilan kelompok rentan/marginal, seperti perempuan, penyandang cacat, usia lanjut, anak-anak yang gagal bersekolah, dll.
 - d. Keterwakilan per wilayah/per dusun.
 - e. Memperhatikan komposisi jumlah laki-laki perempuan
2. Melaksanakan Lokakarya atau Forum Grup Diskusi dengan materi:
 - a. Tujuan dan strategi pelaksanaan program Destana
 - b. Proses, tahapan-tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan
 - c. Hasil-hasil yang hendak dicapai dari tiap kegiatan
3. Pembentukan Kelompok Kerja pelaksanaan Destana sejumlah \pm 30 Orang.

Tahapan pelaksanaan pembuatan profil desa

1. Pembuatan profil Desa berbasis kebencanaan dilakukan melalui lokakarya atau forum grup diskusi
2. Kelompok kerja pelaksanaan Destana di desa melakukan pengumpulan data dan informasi Desa/ Kelurahan berupa:
 - a. Data potensi umum, meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah, bentangan wilayah dan letak pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bahan galian, sumber daya air, kualitas lingkungan, ruang publik/taman dan lokasi wisata.
 - b. Data dasar sumber daya manusia terpilah yang meliputi jumlah, usia, pendidikan, mata pencaharian pokok, agama dan aliran kepercayaan, kewarganegaraan, etnis/suku bangsa, cacat fisik dan mental dan tenaga kerja.
 - c. Data lembaga pemerintahan desa dan kelurahan berupa lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, partai politik, lembaga perekonomian, lembaga pendidikan, lembaga adat dan lembaga keamanan dan ketertiban.
 - d. Data sarana dan prasarana berupa sarana dan prasarana transportasi, informasi dan komunikasi, air bersih/sanitasi, kondisi irigasi, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, peribadatan, olah raga, kesehatan, pendidikan, energi /penerangan, hiburan/wisata dan kebersihan.
3. Lokakarya atau forum grup diskusi dilaksanakan dengan:
 - a. Membagi peserta ke dalam kelompok yang lebih kecil sesuai proporsi keterwakilan masyarakat.
 - b. Menggunakan alat bantu berupa peta/sketsa desa untuk mendiskusikan topik Profil Desa seperti wilayah, tata guna lahan/ruang, topografi, ciri-ciri geomorfologi, dan sebaran penduduk.
 - c. Memetakan dan mengidentifikasi sumber-sumber ancaman dan bencana yang pernah terjadi.
 - d. Menyimpulkan hasil diskusi masing-masing kelompok dan menginventarisir seluruh kejadian bencana yang pernah terjadi.
4. Membuat laporan Pelaksanaan proses pembuatan profil desa dengan memasukkan catatan penting tentang penjelasan, proses, dan hasil-hasil yang disepakati dan rencana tindak lanjut.

4.2. Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Dan Peta Risiko Bencana

Kajian Risiko Bencana adalah “Mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah” (Perka No 2/2012). Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan risiko yang terjadi akibat bencana yang merupakan fungsi dari ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas (*capacity*). Hasil kajian dari peta risiko bencana berfungsi sebagai instrumen (alat) dalam perencanaan untuk menentukan prioritas pembangunan dan tindak lanjut yang harus dilakukan sebagai antisipasi terhadap bencana.

Output Yang Dihasilkan:

1. Dokumen kajian risiko bencana
2. Peta risiko bencana

Tahapan Pelaksanaan Pembuatan Kajian Risiko Bencana

1. Pembentukan tim pelaksana kajian risiko bencana yang terdiri dari anggota kelompok kerja pelaksanaan Destana.
2. Kelompok kerja pelaksanaan Destana melakukan diskusi penilaian ancaman melalui Pengengenalan jenis dan keragaman ancaman desa sebagaimana tabel 1:

Tabel 1 : Ragam dan jenis ancaman

| Jenis Ancaman | Ragam Ancaman |
|---------------------------------|--|
| <i>Ancaman geologi</i> | <i>Gempa bumi, tsunami, longsor, gerakan tanah</i> |
| <i>Ancaman Hidrometeorologi</i> | <i>Banjir, topan, banjir bandang, kekeringan</i> |
| <i>Ancaman biologi</i> | <i>Wabah, hama/penyakit tanaman, penyakit hewan</i> |
| <i>Ancaman kegalanteknologi</i> | <i>Kecelakaan transportasi, pencemaran industri</i> |
| <i>Ancaman lingkungan</i> | <i>Kebakaran, kebakaran hutan, penggundulan hutan.</i> |
| <i>Ancaman sosial</i> | <i>Konflik, terrorisme</i> |

3. Diskusi untuk menentukan tingkat ancaman.

Setiap jenis ancaman memiliki dampak dan frekuensi kejadian yang berbeda-beda. Maka perlu dibuat klasifikasi dari tiap jenis ancaman yang terjadi di Desa sehingga bisa dinilai besaran dampak yang mungkin terjadi dari tiap jenis ancaman.

Tabel 2. Pemeringkatan ancaman

| Ancaman | Dampak | Kemungkinan Terjadi | Total Nilai |
|------------------|--------|---------------------|-------------|
| Gempa bumi | | | |
| Tsunami | | | |
| Banjir | | | |
| Gelombang pasang | | | |
| Konflik sosial | | | |

Nilai Kemungkinan terjadi

Nilai 1 = Tidak mungkin terjadi
 Nilai 2 = Kemungkinan kecil terjadi
 Nilai 3 = Sangat mungkin terjadi
 Nilai 4 = Pasti terjadi

Perkiraan dampak

Nilai 1 = Tidak parah
 Nilai 2 = Agak parah
 Nilai 3 = Parah
 Nilai 4 = Sangat parah

4. Diskusi penentuan karakter ancaman

Setiap jenis ancaman wajib dikenali karakter atau ciri-cirinya. Karakter atau ciri-ciri tersebut bisa dilakukan berdasarkan ukuran ilmiah atau alamiah.

Tabel 3: Contoh Pengisian Tabel Analisis Ancaman *Jenis Ancaman: Konflik Sosial*

| FAKTOR | KETERANGAN |
|-------------------------|--|
| <i>Asal penyebab</i> | <i>a. Kesenjangan sosial-ekonomi. b. Minuman keras.</i> |
| <i>Faktor Perusak</i> | <i>Senjata tajam, batu, bom molotov</i> |
| <i>Tanda Peringatan</i> | <i>Gangguan ketentraman, Cekkock,Isu-isu, Selebaran gelap, Minuman keras</i> |
| <i>Sela Waktu</i> | <i>1 jam</i> |
| <i>Kecepatan Hadir</i> | <i>1 jam</i> |
| <i>Periode</i> | <i>a. 1 tahun sekali (setiap malam tahun baru) b. Sepanjang tahun</i> |
| <i>Frekuensi</i> | <i>a. 1 kali (konflik dengan warga luar kampung) b. Sekali sebulan (konflik antar warga sekampung)</i> |
| <i>Durasi</i> | <i>1 hari</i> |
| <i>Intensitas</i> | <i>1 kampung</i> |
| <i>Posisi</i> | <i>Di luar kampung (jarak ± 0,5 km)</i> |

5. Diskusi Penilaian Kerentanan

Penilaian kerentanan dilakukan dengan mengidentifikasi dan memperkirakan aset berisiko dan bentuk risikonya dan kemungkinan penyebab berisikonya aset tersebut. Dalam melakukan penilaian kerentanan harus ditemukan hubungan sebab – akibat antar 3 (tiga) komponen pembentuk kerentanan atau resiko tersebut

Tabel 4: Contoh Pengisian Tabel Kerentanan
Ancaman: Tanah longsor

| Aset Berisiko | Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset | Kelemahan Penyebab Aset Berisiko |
|-----------------------|---|---|
| Manusia | Meninggal 130 jiwa Luka-luka 300 jiwa Menderita ISPA | - Masa bodoh/males tahu - Tidak tahu tanda-tanda longsor Tempat tinggal di kawasan rawan longsor - Tidak waspada - Tidak sempat melarikan diri |
| Finansial | Harta benda rusak/hilang: - barang elektronik 80 unit - surat berharga 60 lembar - perhiasan 100 gr - mobil 50 unit - sepeda motor 100 unit Ternak mati/hilang: - sapi 300 ekor - kambing 100 ekor - ayam 1000 ekor - ... | - Tidak sempat diselamatkan |
| Aset Berisiko | Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset | Kelemahan Penyebab Aset Berisiko |
| Fisik / Infrastruktur | Rumah - rumah rusak ringan 50 unit - rumah rusak sedang 30 unit - rumah rusak berat 50 unit rumah rusak total 100 unit Kantor pemerintah desa 1 unit rusak berat Gedung SD 1 unit rusak berat Puskesmas 1 unit rusak berat | - Berada di kawasan rawan longsor |
| Alam / Lingkungan | Kebun 45 hektar gagal panen Sumber air tercemar abu vulkanik | - Belum sempat panen Tanaman mati - Sumber air di kawasan sebaran abu dan tidak terlindungi |
| Sosial/Politik | Kehilangan keluarga Pemerintahan desa lumpuh Terjadi konflik bantuan | |

6. Diskusi Penilaian Kapasitas

Kapasitas adalah sebuah bentuk dari kemampuan untuk mengurangi kerentanan, mencegah ancaman atau mengurangi tingkat ancaman. Kemampuan atau resorces tersebut tersebut bisa berupa kebijakan, kegiatan, pengetahuan, keterampilan, alat, tenaga, dana dan lainnya. Pengisian Tabel 5 berdasarkan jenis-jenis ancaman yang ada sehingga bisa didapatkan informasi kapasitas yang telah tersedia.

Tabel 5: Contoh Pengisian Tabel Penilaian Kapasitas
Jenis Ancaman: Angin Puting Beliung

| Aset Berisiko | Kekuatan Tersedia (untuk mengurangi risiko bencana) |
|---------------------|--|
| Manusia | Ada organisasi pemuda, ada dana desa desa, pengurus RT/RW, kelompok tani |
| Finansial | - |
| Fisik/Infrastruktur | Tenaga tukang bangunan Desain konstruksi atap |
| Alam/Lingkungan | - |
| Sosial/Politik | - |

7. Diskusi Penilaian Risiko Bencana

Penilaian risiko dilakukan dengan mengelompokkan setiap aset berisiko berdasarkan hasil diskusi terkait ancaman, kerentanan dan kapasitas, sebagaimana dicontohkan pada tabel 6.

Tabel 6: Contoh pengisian tabel penilaian risiko
Jenis Ancaman: Angin Puting Beliung

| Aset Berisiko | Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset | Kapasitas | Kerentanan | Tingkat Risiko (T/S/R) |
|---------------|---|--|--|------------------------|
| Manusia | <ul style="list-style-type: none"> - 25 orang luka-luka - 200 jiwa mengungsi (L: 70, P:70, Balita:40, Lansia:20) - 10 orang mengalami gangguan psikososial | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya akses informasi masyarakat (TV dan HP) - Meningkatnya pendidikan masyarakat - Memiliki sarana pendidikan (PAUD, SD dan SMP) - Pernah mengalami berbagai peristiwa (wabah, kelaparan. bencana) - Mampu menyesuaikan diri dan mengatasi kesulitan - Adanya Tim Siaga Bencana | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah penduduk - Antara jam 08.00 s/d 10.00 desa Mataram dalam keadaan sepi. Semua orang dewasa bekerja | S |

| Aset Berisiko | Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset | Kapasitas | Kerentanan | Tingkat Risiko (T/S/R) |
|-------------------------|---|--|---|------------------------|
| Ekonomi/ Finansial | 70 keluarga kehilangan mata pencaharian | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor (motor, mobil) - Meningkatnya jumlah dan jenis usaha perdagangan - Ada hasil pertanian sepanjang tahun (kebun, buah dan sayuran) - Satu keluarga bisa memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan - Banyak jenis produk pertanian/perkebunan/ peternakan dikonsumsi sendiri (sistem pangan lokal kuat) | <ul style="list-style-type: none"> - Musim tanam padi hanya 1 kali setahun - Bulan 6 dan 7 tidak ada panen berbarengan dengan pendaftaran sekolah - Kelangkaan pupuk pada musim tanam - Produktifitas tanaman perkebunan (coklat, karet, kelapa) menurun pada musim kemarau - Musim penghujan kandungan air terlalu tinggi (karet/nira) - Harga jual produk pertanian/perkebunan/peternakan tidak stabil - Upah buruh/tukang rendah dan pembayaran tidak tepat waktu - Minimnya permodalan usaha (bengkel/dagang) | S |
| Fisik/ Infrastruktur | 70 unit rumah rusak | <ul style="list-style-type: none"> - Material bangunan murah dan mudah didapat | <ul style="list-style-type: none"> - Banyak pohon-pohon tinggi di permukiman - Bangunan rumah mudah rusak tertiup angin - Tidak ada akses jalan untuk pengangkutan hasil pertanian - Jalan rusak/tidak terpelihara | T |

| Aset Berisiko | Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset | Kapasitas | Kerentanan | Tingkat Risiko (T/S/R) |
|---------------------|--|--|--|------------------------|
| Alam/ Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> - 7 hektar sawah rusak/gagal panen - 10 hektar kebun karet/kelapa rusak | <ul style="list-style-type: none"> - Bentang alam luas dan datar untuk beragam pemanfaatan - Memiliki beragam sumberdaya alam - Jenis tanah dapat ditanami beragam jenis tanaman pertanian dan perkebunan - Tersedia kotoran ternak untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik | <ul style="list-style-type: none"> - Areal pertanian tadah hujan/ Tidak ada irigasi teknis - | R |
| Sosial/ Politik | Terjadi ketegangan sosial antar penyintas dan relawan | <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki banyak organisasi | <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi tidak aktif - Kegotongroyongan menurun - Sering terjadi pencurian di kebun (kopi, coklat, karet) - Kurangnya pendampingan sektor pertanian/ perkebunan/ peternakan | T |

- *Tahapan Pembuatan Peta Risiko Bencana*

1. Pembuatan peta risiko bencana merupakan bagian dari tugas tim Penyusun Kajian Risiko Bencana
2. Unsur dalam peta risiko bencana paling sedikit memiliki obyek berupa; 1) jalan, 2) rumah, 3) rumah dengan penduduk rentan, 4) rumah memiliki kendaraan untuk evakuasi, 5) jalur aman evakuasi, 6) titik tujuan evakuasi, 7) daerah diperkirakan terkena ancaman, 8) arah kedatangan ancaman, 9) kebun, 10) sumber air, 11) bangunan atau fasilitas umum seperti sekolah, balai kampung, dan puskesmas, 12) letak alat tanda bahaya, 13) sungai, 14) bukit/lembah, 15) garis batas wilayah kampung, 16) hutan, 17) data penduduk, dan sebagainya.
3. Setelah unsur peta disepakati maka dilakukan proses penggambaran peta. Penggambaran dimulai dengan menggambar batas wilayah, jalan,

sungai setelah itu baru memasukkan unsur-unsur peta lainnya untuk mempermudah proses penggambaran masing-masing elemen menggunakan warna yang berbeda.

4. Setelah peta selesai digambar maka dilakukan pengecekan lapangan bersama dengan para peserta diskusi dengan membawa serta peta hasil penggambaran agar bisa langsung memberikan catatan-catatan jika ada yang terlewatkan. Sehingga peta-peta yang dihasilkan tersebut bisa menggambarkan Risiko dan area terdampak per jenis ancaman yang ada.

4.3. Pengembangan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat

Peringatan dini adalah adalah suatu rangkaian cara pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya (ancaman) bencana. Masyarakat di daerah berpotensi ancaman / bencana perlu kesepakatan dan tahu tentang jenis peringatan yang dapat dijadikan rujukan bersama sebagai pertanda waktu yang tepat untuk menyelamatkan diri.

- Output yang dihasilkan: Dokumen Sistem Peringatan Dini
- Tahapan Pelaksanaan
 1. Data utama yang diperlukan adalah peta bahaya / peta risiko atau peta dengan gambar yang menunjukkan pusat ancaman yang telah dibuat oleh tim.
 2. Melaksanakan lokakarya atau diskusi kelompok kerja destana dengan cara:
 - a. Membagi peserta menjadi kelompok sebanyak jenis ancaman yang diprioritaskan.
 - b. Menandai dan menulis data dan penjelasan per jenis ancaman yang ada. Sebagai contoh untuk ancaman banjir bandang perlu memasukkan informasi tentang:
 1. Menentukan sumber banjir bandang, misalnya waduk/dam, daerah aliran sungai (DAS) yang terbuka, hutan gundul baru ditebang.
 2. Membuat garis penghubung dari sumber banjir bandang
 3. Memperkirakan jarak dari sumber banjir bandang
 4. Memperkirakan lama waktu tempuh banjir dari sumber banjir sampai ke desa.

5. Mengidentifikasi wilayah atau area yang dilalui oleh banjir atau area yang terdampak oleh banjir bandang.
 - d. Peserta lokakarya mengidentifikasi, memilah dan menyepakati alat komunikasi tercepat dan terhandal untuk menyampaikan informasi seperti kentongan, bedug, lonceng, pengeras suara, sirine, HT, HP, Telpon, radio komunitas, bendera warna dan lampu tertentu.
 - e. Menyepakati tindakan yang dilakukan warga bila menerima informasi/peringatan dini.
3. Membuat laporan proses pemilihan dan pengembangan sistim peringatan dini yang disepakati.

4.4. Penyusunan Rencana Evakuasi Desa

Rencana penyelamatan atau rencana evakuasi dapat dikembangkan oleh masyarakat di kawasan rawan bencana dengan didasarkan pada informasi, pengetahuan dan pemahaman memadai pada karakter ancaman dan sistem peringatan dininya. Pengembangan rencana evakuasi minimal berupa: tempat evakuasi, jalur evakuasi, peta evakuasi, dan strategi atau cara evakuasi.

- Output yang dihasilkan: Dokumen Rencana dan Peta Evakuasi Desa/Kelurahan

- Tahapan Pelaksanaan

1. Dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen kajian risiko bencana, peta risiko bencana dan rencana sistem peringatan dini.
2. Melakukan lokakarya atau diskusi dengan kelompok kerja Destana untuk:
 - a. Mengidentifikasi tempat-tempat aktivitas masyarakat melalui peta risiko bencana yang telah dibuat.
 - b. Menentukan tempat-tempat evakuasi dengan mengidentifikasi tempat-tempat yang dapat dijadikan tujuan evakuasi di area-area aman.
 - c. Menyepakati jalur-jalur evakuasi dan penanda yang dibutuhkan dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.
 - d. Menyepakati strategi dan tata cara evakuasi termasuk juga untuk kelompok rentan dan difabel.
3. Membuat laporan pelaksanaan rencana kesepakatan rencana evakuasi Desa/Kelurahan

4.5. Penyusunan Rencana Kontinjensi

Perencanaan kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan untuk kesiapan tanggap darurat yang di dalamnya terdapat situasi potensi bencana yang mungkin terjadi tetapi bisa juga peristiwa itu tidak akan terjadi.

- Output yang Dihasilkan :

Tersusunnya Dokumen Rencana Kontinjensi

- Tahapan Pelaksanaan

- Melakukan pemetaan para pihak yang berkompeten atau memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pembuatan dokumen.
- Membentuk kelompok kerja dengan melibatkan orang-orang yang merepresentasikan kelompok-kelompok yang ada di Desa/Kelurahan termasuk juga kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
- Menyepakati pembuatan dokumen rencana kontinjensi per ancaman yang ada berdasarkan data profil desa, dokumen kajian risiko bencana, peta risiko bencana yang telah dibuat.
- Melaksanakan forum grup diskusi untuk menyusun dokumen rencana kontinjensi. Sebagaimana sistematika laporan yang ada di dalam tabel-9.

Tabel 9. Sistematika Dokumen Rencana Kontinjensi

| No | Bagian | Isi |
|----|--|--|
| 1. | Latar Belakang | Berisi penjelasan latar belakang mengapa dibutuhkan rencana kontinjensi, ruang lingkupnya, serta ladasan-landasan formal dan pengertian rencana kontinjensi |
| 2. | Tujuan | Berisi penjelasan tujuan umum dan khusus perencanaan kontinjensi |
| 3. | Pengkajian risiko bencana /penilaian ancaman | Berisi deskripsi hasil pengkajian risiko atau penilaian ancaman sebagai dasar pengembangan skenario |
| 4. | Pengembangan skenario | Berisi skenario kejadian ancaman dan kerugian-kerugian pada aspek manusia, sosial, ekonomi, politik, infrastruktur dan lingkungan/alam |
| 5. | Kebijakan dan strategi | Berisi pernyataan kebijakan untuk mengurangi risiko bencana akibat ancaman serta strategi-strategi untuk melaksanakan atau mencapai hasil dari pernyataan kebijakan |
| 6. | Perencanaan sektoral | Berisi pemetaan aktor/stakeholder/pelaku, kebutuhan jumlah dan nama sektor, penjelasan situasi, tujuan, sasaran, proyeksi kebutuhan sumberdaya dan analisa kesenjangan (kebutuhan vs ketersediaan sumberdaya) per sektor |
| 7. | Simulasi ruang dan lapang | Berisi rencana simulasi ruang dan lapang |
| 8. | Rencana tindak lanjut | Menjelaskan rencana-rencana untuk melakukan perbaikan, formalisasi, pelatihan |

- Membuat laporan pelaksanaan pemnyusunan rencana kontinjensi

4.6. Penguatan Forum Desa/Kelurahan Untuk Pengurangan Risiko Bencana dan Pembangunan

Kelembagaan dalam Penanggulangan Bencana atau Pengurangan Risiko Bencana di tingkat desa adalah upaya pengorganisasian secara legal/formal upaya-upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Kelembagaan ini dapat terbagi menjadi dua yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Tim Siaga Bencana Desa. Forum PRB Desa/Kelurahan merupakan wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di desa. Forum ini menjadi sarana koordinasi, konsolidasi dan kerjasama. Forum ini juga menjadi mitra bagi Pemerintah Desa, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan pengurangan risiko bencana. Diharapkan Forum ini benar-benar dilahirkan oleh masyarakat dan akan bekerja untuk kepentingan masyarakat bersama.

- Output yang dihasilkan:
 - Pengesahan Forum PRB Desa/Kelurahan
 - Forum PRB Desa memiliki Struktur, Surat Keputusan Desa/Kelurahan, Tugas Pokok Fungsi dan Program Kerja

- Tahapan Pelaksanaan:
 1. Identifikasi Keanggotaan Forum PRB Desa/Kelurahan

Mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat masuk ke dalam keanggotaan Forum PRB Desa/Kelurahan yang dapat terdiri atas unsur Pemerintah Desa, Lembaga Desa (BPD, LPMD, Gapoktan, dll), tokoh masyarakat, tokoh agama, Karang Taruna, Satlinmas Desa/Kelurahan, PKK, Penyandang Disabilitas, sektor swasta yang ada di Desa/Kelurahan, serta elemen masyarakat lainnya.

Metode: Curah Pendapat

 2. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan

Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 - Menghadirkan dan menyuarakan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.
 - Keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marjinal dalam kepengurusan.
 - Forum memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif, dapat dipercaya dan kreatif. Forum PRB Desa/Kelurahan perlu diberi kewenangan yang

cukup dan status hukum yang pasti, sehingga dapat menjalin kerjasama dan hubungan kelembagaan yang baik dengan pemerintahan desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya.

- Forum perlu menyusun rencana kerja yang realistis dan dapat dikerjakan, lengkap dengan prioritas rencana aksi masyarakat serta sumber penganggarnya.

3. Pembentukan dan Pengesahan Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi Forum PRB Desa/Kelurahan

- Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan ataupun oleh organisasi luar yang memiliki perhatian dalam pengurangan risiko bencana di desa (Akademisi, LSM, BPBD, dll).
- Proses pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan dapat melalui musyawarah desa dengan memastikan keterwakilan unsur-unsur masyarakat yang tersebut di atas.
- Proses Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan terdokumentasi melalui berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan unsur masyarakat dan pemerintah desa.
- Organisasi Forum PRB Desa/Kelurahan disahkan melalui Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Struktur Organisasi Forum PRB Desa/Kelurahan terdiri dari:

Dewan Penasehat:

- Kepala Desa/Lurah
- BPD Desa

Dewan Pengurus:

- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- Kordinator Bidang Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dan anggota
- Kordiantor Bidang Tanggap Darurat dan anggota
- Kordinator Bidang Pemulihan dan anggota

4. Penyusunan Visi, Misi dan Program Kerja Forum PRB Desa/Kelurahan

- Penyusunan Visi, Misi dan Program Kerja Forum PRB Desa/Kelurahan dapat dilakukan secara mandiri oleh anggota forum ataupun dapat

difasilitasi oleh organisasi luar yang memiliki perhatian dalam pengurangan risiko bencana di desa (Akademisi, LSM, BPBD, dll).

- Program Kerja Forum PRB Desa/Kelurahan merupakan bagian dari rencana pembangunan desa/kelurahan yang dimasukkan dalam RPJM Desa.
- Program Kerja Forum PRB Desa/Kelurahan disusun melalui Rapat Kerja Forum PRB Desa/Kelurahan.
- Program Kerja Forum PRB Desa/Kelurahan adalah rencana kerja yang akan dilakukan Forum PRB Desa/Kelurahan dalam masa pra bencana, tanggap darurat bencana dan pemulihan bencana.

5. Mobilisasi Sumber Daya yang berkelanjutan

- Forum PRB Desa/Kelurahan memastikan sumber daya untuk mendukung kerja-kerjanya melalui dukungan Pemerintah Desa melalui dana desa, luran Warga masyarakat dan kerja sama dengan sektor swasta.
- Forum PRB Desa/Kelurahan dapat bekerjasama dengan pihak luar dalam peningkatan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana di desanya.
- Forum PRB Desa/Kelurahan menyusun peta jalan upaya penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di desa/kelurahan.

4.7. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa disusun pemerintah desa bersama masyarakat secara partisipatif. Sebagai representasi masyarakat dapat melibatkan Forum PRB Desa. RPB Desa tersebut memuat rencana penanggulangan bencana Desa/Kelurahan untuk 5 (lima) tahun) berdasarkan profil risiko bencana pada desa/kelurahanyang meliputi pengurangan risiko bencana, baik dalam bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi untuk seluruh ancaman bencana prioritas.

RPB merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang terpisah dengan RPJM Desa/Kelurahan. RPB menjadi dokumen acuan bagi desa/kelurahan dalam menyusun program pembangunan yang terkait dengan penanggulangan bencana desa/kelurahan melalui proses perencanaan pembangunan ditingkat desa/kelurahan.

- Output yang dihasilkan:
Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan
- Tahapan Pelaksanaan:
 1. Persiapan Penyusunan RPB Desa/Kelurahan
 Pengantar tentang urgensi penyusunan RPB sebagai perencanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana untuk seluruh ancaman bencana prioritas.
 Peserta yang dilibatkan dalam penyusunan RPB Desa/Kelurahan tidak terbatas pada:
 - Forum PRB Desa
 - Kepala Desa / Lurah, Sekretaris Desa / Kelurahan, Kaur Pembangunan,
 - Tokoh Masyarakat / Tokoh Keagamaan / Tokoh Perempuan
 - Badan Permusyawaratan Desa
 - Perwakilan Kelompok Rentan (Anak, Penyandang Disabilitas, Lansia)
 Data/dokumen yang perlu dipaparkan sebagai dasar dalam penyusunan RPB adalah:
 - Hasil Kajian Risiko; ancaman prioritas, kerentanan, kapasitas, dan risiko.
 - Kaitan antara RPB, RPJMDes dan RKPDes,
 - Tahapan proses penyusunan RPB dan susunan isi RPB

Contoh Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan

| Visi: Mewujudkan Ketangguhan Bencana Desa Misi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Aparatur Desa yang tanggap bencana 2. Meningkatkan pelayanan ketanggap darurat bencana yang menekankan pada kearifan lokal 3. Memberikan layanan pemulihan bencana yang inklusif 4. Membangun keluarga yang tangguh bencana | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| No. | Program | Target Capaian/Hasil Kegiatan | Penanggung jawab | Waktu Pelaksanaan | Jumlah Dana | Sumber Dana |
| 1. | Kegiatan Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana - - | | | | | |
| 2. | Kegiatan Tanggap Darurat/Saat Bencana - - | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3. | Kegiatan Pasca Bencana/Rehabilitasi dan Rekontruksi | | | | | |
| | - | | | | | |
| | - | | | | | |

4.8. Integrasi RPB Dan RAK Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Komunitas (RAK) merupakan dokumen yang tidak terpisah dari dokumen perencanaan desa baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. RPB inilah yang diturunkan dalam RAK yang memuat Rencana Aksi atau dukungan yang dilakukan oleh berbagai pihak di semua tahapan atau siklus penanggulangan bencana (pra bencana, saat bencana dan pasca bencana).

- Output yang dihasilkan:

1. RPB menjadi bagian dari RPJMDes
2. RAK menjadi bagian dari RKPDes/Kelurahan

- Tahapan Pelaksanaan:

- a Pembentukan tim penyusun RPB dimana keanggotaan tim penyusun merupakan juga anggota tim penyusunan RPJMD Desa.
- b Tim Penyusun RPB melaksanakan lokakarya atau forum grup diskusi untuk mendapatkan masukan terkait perbandingan antara RPJMDes dengan RPB Desa sehingga bisa didapatkan hasil berupa:
 1. Disepakatinya penggunaan profil Desa yang berbasis risiko bencana sebagai dasar dari pembuatan RPJMDes.
 2. Mengidentifikasi masalah yang ada di Desa
 3. Mengidentifikasi kebijakan dan program kerja di Desa
- c Tim penyusun RPB Desa melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat untuk memasukkan RAK RPB kedalam RKP Desa melalui Murenbangdes.

Tim penyusun RPB memantau dan memastikan bahwa kegiatan didalam RPB Desa dan RAK masuk ke dalam RKP Desa.

4.9. Penyusunan Perencanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program Kepada Masyarakat Umum

Partisipan kegiatan Sosialisasi dan diseminasi adalah perwakilan kelompok-kelompok masyarakat ataupun kelompok rentan yang ada di desa/kelurahan

maupun anggota masyarakat lainnya yang disesuaikan dengan hasil kajian risiko desa/kelurahan. Selain itu, partisipan dapat pula diidentifikasi berdasarkan materi sosialisasi dan diseminasi yang akan dihantarkan. Perlu dipastikan bahwa dalam proses sosialisasi dan diseminasi ini keterlibatan perempuan, kelompok rentan dan kelompok yang memiliki keterbatasan secara fisik – (GEDSI)

- Output Yang dihasilkan:

1. Tersusunnya Rencana Kerja Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
2. Tersusunnya Agenda/Materi Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
3. Tersusunnya Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

- Tahapan Pelaksanaan:

1. Penyusunan Rencana Kerja Sosialisasi dan Diseminasi

Dalam tahapan ini, penting bagi kelompok kerja untuk mengidentifikasi isu yang akan dihantarkan dalam kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil program desa/kelurahan tangguh bencana. Selain itu, dengan mengacu terhadap hasil kajian risiko bencana, kelompok kerja juga dapat mengidentifikasi kelompok sasaran serta waktu yang tepat untuk dilakukan sosialisasi dan diseminasi. Selanjutnya Kelompok kerja dapat menyusun rencana sosialisasi dan diseminasi untuk menentukan pembagian kerja masing-masing anggota kelompok serta sumberdaya yang dibutuhkan.

- a. Identifikasi Isu untuk Sosialisasi dan Diseminasi

Kegiatan sosialisasi dan diseminasi dapat dijadikan alat untuk mempengaruhi konteks politik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kerentanan masyarakat. Sebagai contoh:

1. Mendorong pemerintah lokal untuk menyebarkan informasi mengenai Status Pintu Air, akan mengurangi kerentanan masyarakat
2. Sosialisasi pentingnya ijin mendirikan bangunan untuk mitigasi dampak dari gempa
3. Sosialisasi pentingnya manajemen tata guna lahan dan sempadan sungai untuk mengurangi risiko banjir dan penurunan kualitas lahan

Sosialisasi dan diseminasi ini dapat pula dilakukan untuk mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat dalam pengurangan risiko bencana.

Proses Kajian risiko merupakan alat yang tepat untuk mengidentifikasi akar masalah dari kerentanan terhadap ancaman bencana. Banyak dari akar masalah ini dapat diatasi melalui perbaikan terhadap kebijakan pemerintah, intervensi terhadap perubahan perilaku maupun kombinasi keduanya. Sosialisasi dan Diseminasi harus didasari oleh “informasi” atau “pesan” yang tepat. Oleh karena itu penting untuk memahami isu yang akan disosialisasikan. Pertanyaan- pertanyaan berikut ini akan membantu anda dalam mengelola informasi:

1. Apa masalahnya?
2. Apa akar masalahnya?
3. Apa dampak yang timbul jika masalah tersebut tidak diatasi?
4. Apa yang ingin anda ubah?

b. Pemetaan Para Pelaku

Tidak ada aturan yang pasti untuk menyatakan siapa yang perlu terlibat dalam upaya sosialisasi dan diseminasi ini. Perlu kita ketahui bahwa keterlibatan para pihak akan tergantung terhadap konteks spesifik, sesuai dengan kondisi lokal. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengidentifikasi para pihak, baik melalui kajian risiko bencana yang sudah dilakukan, ataupun dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

1. Siapa pelaku yang terpinggirkan dan tidak berpendapat harus dilakukan upaya-upaya khusus untuk mengikutsertakan mereka
2. Siapa perwakilan dari kelompok yang terkena dampak dari masalah tersebut?
3. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan jasa/pelayanan terkait dengan masalah- masalah tersebut
4. Siapa yang dapat menggunakan upaya-upaya sosialisasi dan diseminasi menjadi efektif melalui keterlibatannya
5. Siapa yang berkontribusi terhadap pendanaan dan sumberdaya teknis terhadap kegiatan sosialisasi dan diseminasi

Saat semua para pihak yang berhubungan dengan permasalahan telah diidentifikasi, penting untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana hubungan para pemangku kepentingan yang terkait dengan masalah kita. Dengan kata lain, untuk mencari tahu siapa yang melakukan apa. Bila memungkinkan perlu mencari tahu siapa pemain utama, dan mengidentifikasi kunci hubungan, masalah, peluang dan pendekatan yang dilakukan. Kita perlu menghindari

duplikasi usaha dan dapat menemukan mitra atau orang kunci untuk mendukung inisiatif sosialisasi dan diseminasi ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan target upaya-upaya sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kita.

Parapihak / parapelaku / para pemangku kepeningan (para pihak) adalah orang, kelompok, organisasi atau system yang mempengaruhi atau dapat terpengaruh oleh masalah yang akan disosialisasikan dan diseminasikan.

Proses ini relatif sederhana di tingkat lokal karena biasanya jumlah yang ada jauh lebih kecil dari pelaku. Aktor-aktor lokal ini juga pada akhirnya mereka yang bertanggung jawab untuk tindakan pengurangan risiko bencana dapat dilakukan.

c. Pengembangan Rencana Kerja Sosialisasi dan Diseminasi

Adalah penting untuk mendefinisikan tujuan dari kegiatan sosialisasi dan diseminasi untuk menentukan apa yang ingin dicapai sesuai dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki.

Tujuan merupakan keinginan yang bersifat luas dan umum, serta mengandung pengharapan, dan pencapaiannya jauh tak terbatas. Dalam perencanaan komprehensif pengurangan risiko bencana, tujuan berasosiasi dengan keinginan atau harapan jangka panjang. Sasaran bersifat lebih rinci, dan memperlihatkan

langkah-langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan.

Semua pencapaian tujuan dari Sosialisasi dan Diseminasi ini haruslah SMART (Specific, measurable, achievable, realistic and time-bound)

d. Pengembangan Pesan Kunci Sosialisasi dan Diseminasi

Pesan adalah pernyataan yang didesain untuk mempengaruhi pendapat orang lain. Sebuah pesan menjelaskan apa yang anda usulkan, kepada perlu dilakukan dan dampak positif dari usulan anda. Penggunaan Formula See + Action dapat digunakan untuk menginformasikan, memotivasi, mempengaruhi kelompok sasaran untuk melakukan aksi. Proses dan analisis kajian risiko dapat digunakan untuk sebagai sumber informasi untuk mengembangkan pesan kunci sosialisasi dan diseminasi.

See + Action

Pernyataan sederhana ini, "Jika kita dapat menghentikan pembakaran hutan

dan ladang, maka kita dapat menyelamatkan anak kita", berasal dari fakta / kejadian bahwa pada tahun 2015, telah terjadi kebakaran hutan dan Lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Kebakaran tersebut memiliki nilai ISPU 2108.5 ugr/m3.

Dampaknya terhadap anak-anak adalah semakin meningkatkan kasus ISPA, serta berakibat pula pada kondisi psikologis anak-anak. Sehingga wajar bila seorang anak berkata, "Pada saat terjadi kabut asap, saya tidak bisa sekolah dan bermain dengan teman-teman. Saya juga menderita sakit ISPA, sehingga harus menggunakan masker selama sehari-hari". Pernyataan tersebut menghadirkan aksi "Menyerukan kepada SKPD terkait untuk menegaskan kembali kebijakan mengenai penebangan hutan dan ladang"

2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program

Berdasarkan rencana kerja, maka kelompok kerja melakukan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi sesuai dengan para pihak yang akan terlibat. Berbagai metode dan media dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan sumberdaya dan ketrampilan yang dimiliki yang disesuaikan dengan konteks lokal yang meliputi: Lokakarya, pertemuan, presentasi, mobilisasi masyarakat, penggunaan mass media, printed media, dll. Penting pula disadari oleh kelompok kerja akan pentingnya menyusun agenda jika kegiatan sosialisasi dan diseminasi diarahkan untuk perubahan kebijakan.

3. Penyusunan Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program

Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program dibuat oleh masing-masing anggota kelompok kerja untuk mengidentifikasi bagaimana kegiatan yang telah dilaksanakan berkontribusi terhadap goal dan objective yang telah teridentifikasi sebelumnya.

Laporan harus menyertakan informasi-informasi berikut ini:

1. Pesan kunci sosialisasi dan diseminasi
2. Cara kegiatan dilaksanakan
3. Metode dan media yang digunakan
4. Jumlah peserta yang hadir, dipilahkan berdasarkan jenis kelamin dan umur
5. Temuan hasil

4.10. Pembentukan Relawan

Pada kondisi tanggap darurat, dibutuhkan tenaga-tenaga yang siap untuk memberikan pertolongan segera, pencarian, penyelamatan dan evakuasi, membantu memenuhi kebutuhan darurat. Tenaga-tenaga tersebut bernama relawan tanggap darurat bencana. Untuk menjamin relawan-relawan dapat memberikan respon atau tanggap darurat yang efektif dalam situasi tanggap darurat, diperlukan pengorganisasian yang baik dan berkesinambungan. Untuk itu dibentuklah kelompok relawan desa/kelurahan sebagai wadah pembinaan, pendidikan, pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dan perilaku jiwa korsa dalam penanggulangan bencana.

- Output yang dihasilkan: Pembentukan dan Pelatihan Relawan
- Tahapan Pelaksanaan
 1. Melakukan pemetaan calon anggota relawan melalui FGD yang melibatkan perangkat Desa/Kelurahan, Forum PRB Desa dan kelompok rentan.
 2. Pemilihan kelompok relawan dengan kriteria diantaranya:
 - a. Sehat jasmani, diutamakan orang dewasa dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 50 tahun.
 - b. Memiliki kemauan dan waktu untuk terlibat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - c. Memiliki kemampuan dalam Penanggulangan Bencana
 - d. Memiliki jiwa kerelawanan, semangat, dan dedikasi tinggi
 - e. Mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerjasama dengan pihak lain
 3. Membentuk dan menetapkan struktur kepengurusan dan keanggotaan tim relawan
 4. Mengembangkan database keanggotaan relawan
 5. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan
 6. Melaporkan pelaksanaan pembentukan dan jenis pelatihan yang dilakukan oleh relawan

4.11. Simulasi Sistem Peringatan Dini, Rencana evakuasi dan Rencana Kontingensi

Simulasi merupakan bahan belajar dan pembiasaan masyarakat dalam menghadapi bahaya. Sistem peringatan dini dan rencana evakuasi perlu diketahui, dipahami dan dipraktikkan oleh setiap individu di kawasan rawan bencana. Pemahaman ini didukung dengan adanya komponen-komponen lain seperti media informasi, rambu-rambu dan peralatan lain yang mendukung simulasi. Peralatan yang ada dan tersedia harus diuji cobakan.

- Output yang dihasilkan
Terlaksannya kegiatan simulasi
- Tahapan yang dilaksanakan
 1. Sosialisasi kegiatan simulasi
FPRB Desa/tim relawan memberikan pengantar tentang pentingnya warga masyarakat berlatih dan menguji mekanisme peringatan dini, rencana evakuasi dan rencana kontingensi. Dengan simulasi masyarakat dapat belajar langsung untuk meningkatkan tindakan-tindakan nyata mengurangi

potensi kerugian jiwa dan aset warga. FPRB Desa/Kelurahan atau tim relawan menjelaskan jenis ancaman yang akan disimulasikan, skenario, rantai peringatan, jalur evakuasi, prosedur tiap sektor.

2. Pemasangan Rambu-rambu bencana

Rambu-rambu bencana adalah alat untuk perlengkapan penanggulangan bencana dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi masyarakat. Fungsi rambu bencana adalah untuk mendukung kesiapsiagaan warga ssekitar ataupun siapapun yang berada di lokasi rawan atau aman bencana tersebut.

3. Gladi posko dan gladi ruang

Gladi ruang merupakan ujicoba sistem komando dan koordinasi antar sektor, dimana para pelaku berada pada ruangan berbeda.

4. Gladi Lapang

Kegiatan simulasi lapang menjadi media untuk belajar dengan mempraktekan langsung proses penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dengan mempraktikkan skenario yang hampir mirip dengan kondisi bencana sesungguhnya

4.12. Monitoring dan Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana

Untuk memastikan bahwa kegiatan Destana benar-benar mengarah pada pencapaian karakter masyarakat yang tangguh dan terintegrasi dengan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial), maka diperlukan pemantauan untuk melihat kemajuan kegiatan dan ada-tidaknya perubahan, serta penilaian terhadap pencapaian tersebut [monitoring-evaluasi]. Kegiatan desa/kelurahan tangguh bencana pada dasarnya merupakan kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, karena itu cara-cara yang mengedepankan keikutsertaan masyarakat [partisipatif] menjadi sangat penting, termasuk dalam kegiatan monitoring-evaluasi.

Salah satu perangkat yang telah disiapkan ialah perangkat monitoring perkembangan kegiatan bulanan dan perangkat evaluasi/penilaian awal (baseline) yang kemudian dibandingkan pada akhir program dengan penilaian akhir (endline). Perangkat penilaian ini berguna untuk mengukur ketercapaian indikator dan perubahan-perubahan pada aspek kelembagaan, kebijakan, maupun perilaku berdasarkan kajian dokumen, observasi, hasil FGD, hasil wawancara, dan data sekunder lain.

- Output yang dihasilkan: Laporan hasil monitoring dan evaluasi

- Tahapan Pelaksanaan
 - a. Fasilitator melakukan wawancara pada representasi kelompok/lapisan masyarakat, terutama kelompok marginal untuk menggali persepsi dan pendapat mereka terkait proses, capaian program, kendala, dan keberhasilan.
 - b. Fasilitator melakukan evaluasi dengan menggunakan metode *Foccus Group Discussion* yang mengundang representasi kelompok/lapisan masyarakat. Fasilitator memulai kegiatan evaluasi dengan menjelaskan tujuan dan kegunaan evaluasi.
 - i. Fasilitator memandu jalannya FGD evaluasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait kriteria/aspek evaluasi, kemudian partisipan menulis pada kartu metaplan. Namun apabila partisipan tidak terbiasa mengutarakan pendapat dengan menulis, maka Fasilitator mencatat setiap jawaban pada kertas plano yang harus disepakati semua partisipan.
 - ii. Semua anggota Kelompok Kerja/partisipan menyampaikan pendapatnya tentang praktek- praktek dan cara-cara yang baik dan dilakukan selama proses pelaksanaan program, halmana dapat ditekankan sebagai bagian dari faktor kapasitas masyarakat, demikian juga untuk cara yang kurang tepat guna untuk diperbaiki.
 - iii. Dokumentasi proses dan dokumen capaian indikator dapat dikumpulkan dan dapat dibagikan kepada anggota Kelompok Kerja Desa/Kelurahan sebagai bukti hasil karya masyarakat desa/kelurahan yang nyata.
 - iv. Kemudian Fasilitator mengisi penilaian *endline* ketangguhan desa/kelurahan untuk dibandingkan dengan hasil penilaian *baseline* yang dilakukan di awal pertemuan dari berbagai macam sumber (dokumentasi, observasi, wawancara, FGD, data sekunder).
 - v. Fasilitator menyusun dokumen pembelajaran yang berisi hal baik dan hal yang perlu dihindari tentang seluruh proses dan capaian program.

| Kegiatan | Capaian Output | Alat Verifikasi | | Ket |
|--|----------------|-----------------|---------|-----|
| | | Rekam Proses | Dokumen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pengenalan Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | | | | |
| Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Dan Peta Risiko Bencana | | | | |
| Pengembangan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat | | | | |
| Penyusunan Rencana Evakuasi Desa | | | | |
| Penyusunan Rencana Kontijensi | | | | |
| Penguatan Forum Desa/Kelurahan Untuk Pengurangan Risiko Bencana dan Pembangunan | | | | |
| Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana | | | | |
| Integrasi RPB Dan RAK Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan | | | | |
| Penyusunan Perencanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program Kepada Masyarakat Umum | | | | |
| Pelatihan Relawan | | | | |
| Simulasi Sistem Peringatan Dini, Rencana evakuasi dan Rencana Kontingensi | | | | |
| Monitoring dan Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana | | | | |
| <p>Pengisian Kolom:</p> <p>(2) Apakah hasil yang diharapkan dalam kegiatan sudah tercapai? Bagaimana partisipasi? Apakah dilakukan dengan efektif dan efisien? Bagaimana kemanfaatan dari kegiatan ini?</p> <p>(3) Apakah proses pencapaian hasil telah terumuskan atau tergambarkan di dalam media-media: foto, metaplan, <i>flip chart</i>, notulensi, laporan kegiatan atau media-media lain.</p> <p>(4) Apakah rumusan hasil telah tertuang dalam dokumen atau naskah? Apakah masih berupa draft? Apakah sudah final? Apakah perlu dilegalkan? Apakah sudah dilegalkan?</p> | | | | |

BAB V

STRATEGI PELAKSANAAN DESTANA

5.1. Gambaran Desa Tangguh Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pelaksanaan pembangunan desa tangguh bencana dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun mulai tahun 2011 hingga 2021 tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan *Non-Governmental Organization* (NGO). APBD bisa berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang berasal dari perangkat daerah terkait seperti BPBD NTB, BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Sosial NTB, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan NGO berasal dari Islamic Relief, Palang Merah Indonesia (PMI), PSP, Muslim Aid, Yayasan Skala, Konsepsi, Beruqaq Desa, Samawa Center, World Relief, dan Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi dan Ekonomi Rakyat (LP2DER).

Berdasarkan data terakhir Bulan Agustus Tahun 2022, Desa/Kelurahan tangguh bencana yang ada di Nusa Tenggara Barat tersebar di Kota Mataram mencakup 3 (tiga) Kecamatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan, Kabupaten Lombok Barat mencakup 9 (sembilan) Kecamatan terdiri dari 4 (empat puluh tiga) Desa/Kelurahan, Kabupaten Lombok Tengah mencakup 10 (sepuluh) Kecamatan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Desa/Kelurahan, Kabupaten Lombok Timur mencakup 13 (tiga belas) Kecamatan terdiri dari 46 (empat puluh enam) Desa/Kelurahan, Kabupaten Lombok Utara mencakup 5 (lima) Kecamatan terdiri dari 36 (tiga puluh enam) Desa/Kelurahan, Kabupaten Sumbawa Barat mencakup 4 (empat) Kecamatan terdiri dari 9 (sembilan) Desa/Kelurahan, Kabupaten Sumbawa mencakup 7 (tujuh) Kecamatan terdiri dari 14 (empat belas) Desa, Kabupaten Dompu mencakup 8 (delapan) Kecamatan terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Desa/Kelurahan, Kabupaten Bima mencakup 10 (Sepuluh) Kecamatan terdiri dari 34 (Tiga Puluh Empat) Desa/Kelurahan, Kota Bima mencakup 5 (lima) Kecamatan dan 36 (tiga puluh enam) Desa/Kelurahan. Berdasarkan semua Destana tersebut dapat difasilitasi oleh lebih dari satu Perangkat Daerah dan NGO. Berikut gambaran detail desa tangguh bencana di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.

Secara umum capaian Desa Tangguh Bencana di NTB yang telah ada mencapai 293 Desa/Kelurahan dari 434 Desa/Kelurahan yang menjadi target pencapaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini artinya baru sekitar 67,51% Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang

terbentuk dan sekitar 32,49% yang akan dibentuk untuk pencapaian target RPJMD yaitu sekitar 141 Desa/Kelurahan hingga akhir tahun perencanaan. Kedepan diharapkan semua Desa/Kelurahan yang ada di Nusa Tenggara Barat menjadi Desa/Kelurahan Tangguh bencana yaitu sebanyak 1150 Desa/Kelurahan, artinya tersisa 716 Desa/Kelurahan yang harus terbentuk menjadi Destana. Peran Pemerintah Daerah dan Lembaga Sosial Masyarakat dalam mewujudkan ini harus mendapatkan apresiasi. Kedepannya harus didorong pelibatan unsur *pentahelix* lainnya dalam mengejar target capaian semua Desa/kelurahan di NTB Tangguh bencana, terutama pelibatan sektor akademisi dan dunia usaha. Data Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Hingga 2021 dapat dilihat pada lampiran-1.

Tantangan terbesar dalam program Destana di NTB yang sudah berjalan selama ini, terutama terletak di (i) Lemahnya pembinaan Destana oleh instansi atau organisasi yang membentuknya. Destana hanya sampai tahapan pembentukan saja tanpa disertai proses pendampingan dan advokasi kebijakan di level desa untuk menjamin keberlanjutan Destana; (ii) Sinergisitas dan koordinasi antar instansi ataupun organisasi dalam pembentukan Destana, terlihat adanya lebih dari satu instansi/organisasi yang membentuk Destana di 1 desa yang sama; (iii) Belum adanya penilaian ketangguhan Destana yang sudah terbentuk; (iv) Kurangnya inovasi dan pelibatan unsur Akademisi dan Dunia Usaha dalam implementasi Destana, pembentukan Destana apabila mengacu pada 6 komponen Destana sesungguhnya bisa dikerjakan secara parsial melalui program Kuliah Kerja Nyata Universitas dan Program tanggung jawab social Perusahaan/Dunia Usaha; dan (v) Pembentukan Destana kadang mengabaikan ketangguhan Desa yang telah terbentuk melalui kearifan local dan modal sosial di desa.

5.2. Pembelajaran Praktek Destana

5.2.1. Berbasis Masyarakat

Inisiasi dan pengembangan DESTANA merupakan kerja-kerja atau praktik-praktik membangun ketangguhan bencana yang dilaksanakan oleh dan bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat desa. Keterlibatan perwakilan-perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan lain sebagainya) harus dipastikan pada setiap tahapannya sejak perencanaan, perancangan, implementasi, pengawasan, hingga penilaian/evaluasi. Harus dipastikan juga partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat rentan (perempuan, disabilitas, anak-anak) agar pandangan-pandangan, aspirasi-aspirasi, dan harapan-harapan dapat terakomodir dan diprioritaskan dalam rencana aksi membangun ketangguhan

secara inklusif. Dengan kata lain, masyarakat adalah pelaku utama sebagai pembuat dan pelaksana keputusan-keputusan penting dalam hal penyelenggaraan DESTANA.

Secara empiris, pelibatan masyarakat dimulai sejak pemilihan dan penetapan Kader Lokal DESTANA (1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan) oleh melalui musyawarah bersama perwakilan masyarakat dan pemerintah desa. Kader Lokal DESTANA berperan sebagai penggerak sumberdaya lokal dalam memastikan berlangsungnya kerja-kerja bersama menginisiasi dan membangun serta melembagakan ketangguhan desa terhadap bencana. Beberapa aktivitas kunci untuk memulai pengembangan DESTANA, adalah:

1. Identifikasi bencana-bencana prioritas beserta karakternya masing-masing.
2. Pembuatan peta risiko bencana, meliputi: posisi dan arah ancaman; kapasitas; kerentanan; titik kumpul; jalur dan lokasi evakuasi
3. Analisa risiko bencana bersama masyarakat melalui penerapan alat kaji partisipatif, seperti: alur sejarah kebencanaan, kalender musim, kajian mata pencaharian, relasi sosial, dan lain sebagainya;
4. Penyusunan rencana aksi masyarakat untuk pengurangan risiko bencana;
5. Integrasi rencana aksi masyarakat ke dalam rencana kerja pemerintahan;
6. Penyusunan dokumen terkait pengurangan risiko bencana: sistem peringatan dini, rencana kontijensi, rencana penanggulangan bencana.

Catatan pentingnya: pembentukan DESTANA dengan mengadopsi pendekatan berbasis masyarakat bukanlah sebuah kegiatan 'sekali jadi' atau bersifat instan yakni pertemuan mobilisasi masyarakat dalam satu hari saja. Bahwa, inisiasi dan pengembangan DESTANA merupakan sebuah proses pemberdayaan masyarakat sehingga memerlukan waktu cukup pandemi dan dukungan sumberdaya (tenaga/fasilitator dan pembiayaan) yang tersedia secara memadai. Konsekuensi dari pendekatan berbasis masyarakat akan menghasilkan dinamika inisiasi dan pengembangan model DESTANA yang cukup beragam karena melibatkan konteks pande, seperti: pengetahuan pande, pengalaman kolektif kebencanaan, kepemimpinan sosial, kondisi obyektif wilayah terutama lingkungan fisik, serta komitmen dan dukungan pemerintahan desa. Dalam praktiknya, pelembagaan DESTANA dapat diintegrasikan dengan pandem/isu penting lainnya seperti: UMKM pandemi, pengelolaan sumberdaya alam, tata ruang, adaptasi perubahan iklim, kesetaraan gender, perlindungan anak, inklusi sosial, dan pandemic.

5.2.2. Kemitraan Multi Pihak (KMP)

Dalam kerangka inisiasi dan pengembangan DESTANA, Kemitraan Multi Pihak (KMP) dimaksud adalah bentuk kerjasama didasarkan pada kebutuhan untuk berbagi sumberdaya/kapasitas (pengetahuan, keterampilan, pendanaan dll) dan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang maupun kelembagaan baik Pemerintah (desa,

kabupaten, propinsi), LSM, media, akademisi, dan pihak-pihak lain yang memiliki tupoksi/ mandat/perhatian pada isu ketangguhan terhadap bencana. KMP dalam membangun dan mengembangkan DESTANA tidaklah berarti menghilangkan atau menegasikan eksistensi masing-masing pihak melainkan menyediakan ruang bagi para pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi serta berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan tetap berlandaskan tupoksi maupun mandat masing-masing. Dengan demikian, kemitraan multi pihak justru dapat meminimalisir praktik-praktik ego sektoral.

Berikut contoh implementasi dari Kemitraan Multi Pihak dalam menginisiasi, membangun, dan mengembangkan DESTANA di Nusa Tenggara Barat:

- **Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten):** dukungan kebijakan dan anggaran; penyediaan layanan sesuai dengan tupoksi masing-masing dikaitkan dengan siklus penanggulangan bencana berdasarkan lingkup kewenangan;
- **Pemerintah Desa:** dukungan kebijakan sesuai kewenangan desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan anggaran;
- **Lembaga Swadaya Masyarakat:** dukungan anggaran melalui kerjasama dengan pihak luar (donor); inisiasi dan fasilitasi pembentukan DESTANA; penyadaran, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas masyarakat;
- **Perguruan Tinggi:** mendukung penguatan DESTANA melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (KKN Tematik Kebencanaan);
- **Media massa:** komunikasi, informasi, dan diseminasi praktik-praktik baik DESTANA kepada publik secara meluas;
- **Dunia Usaha:** mendukung penguatan DESTANA melalui dukungan sumberdaya sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

5.2.3. Pendayagunaan dan Perluasan “*Existing Condition*”

Dalam konteks pembentukan desa tangguh, hendaknya para pihak perlu melihat kondisi eksisting yang sudah ada berdasarkan hasil *assesment* dan koordinasi dengan BPBD, sehingga aktor pelaku tidak perlu memulai dari tahapan awal. Konsekuensi yang terbangun ketika harus memulai dari awal proses adalah adanya tumpang tindih kegiatan sehingga cenderung kondisi yang sudah terbangun akan dinegasikan kemudian.

5.2.4. Berorientasi pada “Keberlanjutan” [Pelebagaan]

Orientasi pembentukan desa tangguh sering kali diniatkan untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai target dari sebuah perencanaan di

pemerintah atau di project atau dengan kata lain hanya menyelesaikan kepentingan dan kewajiban sesaat. Kondisi lainnya adalah desa tangguh dibentuk tidak berdasar kesadaran komunitas dan kepentingan masyarakat banyak. Inisiasi pembentukan desa tangguh seperti ini, sering kali tidak berlangsung lama dan tidak berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan program Destana, maka perlu dibentuk kelembagaan seperti forum Pengurangan Risiko Bencana dan atau Tim Siaga Bencana Desa. Kelembagaan ini adalah organisasi yang mengawal kebijakan dan penganggaran di tingkat desa untuk berbagai upaya pengurangan risiko bencana. Pembentukan kelembagaan menjadi tolok ukur adanya keberlanjutan dari program Destana. Dalam menjamin keberlanjutan DESTANA, beberapa peluang yang dapat dioptimalkan adalah:

- Mendorong kelembagaan Relawan TSBD untuk bertransformasi menjadi lembaga sosial desa dan memainkan peran strategis sebagai katalisator agenda PB dan PRB di level desa;
- Pemanfaatan Bidang 5 dalam nomenklatur keuangan desa memberi ruang besar bagi penguatan dan keberlanjutan destana;
- Pelibatan aktor kunci pembangunan desa mulai BPBD, Tim Pendamping Profesional, dan Tim Pendamping Desa menjadikan DESTANA sebagai model yang diinternalisasikan dalam agenda pembangunan desa.

5.3. Strategi Percepatan Pengembangan Destana

Dalam rangka optimalisasi pengembangan Destana dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan yakni:

- (1) Penilaian Secara Rutin, penilaian yang dilakukan secara rutin membantu dalam mengidentifikasi, mengevaluasi serta menjadi wadah umpan balik parapihak dalam melihat kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaan Destana. Disamping untuk meningkatkan kepedulian dan rasa kepemilikan program oleh parapihak di Desa, penilaian rutin juga dapat mendorong desa untuk meningkatkan kualitas destana. Pemerintah dapat memberikan *insentive* untuk pengembangan Destana lebih lanjut. Pedoman untuk melakukan fasilitasi penilaian Destana dapat dilihat pada lampiran-3 tentang Standar Operasional Pelayanan (SOP) Tenaga Fasilitator Penilai Destana.
- (2) Pengembangan Database Destana, Database merupakan basis data yang menjadi salah satu komponen dalam Sistem Informasi Kebencanaan (SIK). Database Destana yang update dan mudah diakses oleh para pelaku pengembangan Destana akan membantu pelaksanaan pengembangan Destana secara terkoordinasi dan terarah. Perangkat Daerah dan pelaku pengembangan Destana lainnya perlu memperhatikan database terutama

dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Desa pada saat penyusunan rencana dan kegiatannya.

- (3) Optimalisasi Peran Perangkat Daerah dalam Penguatan Destana, Perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi masing-masing khususnya dalam urusan kebencanaan dan pengembangan pembangunan di tingkat Desa dan Kelurahan untuk itu peran perangkat daerah telah dijabarkan secara rinci dalam lampiran-2.1 tentang Peran Para Pihak dalam Pelaksanaan Destana sedangkan Keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Ketangguhan Desa dapat dilihat pada lampiran-2.2.
- (4) Pelibatan Peran diluar Pemerintah, Parapihak dalam unsur *pentahelix* di luar pemerintah yakni Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Media Massa merupakan mitra pembangunan bagi pemerintah dalam melakukan pengembangan Destana untuk itu perlu dilakukan koordinasi terpadu dengan unsur-unsur tersebut sebagaimana tertuang dalam lampiran sehingga bisa terwujud kerjasama multipihak guna pengembangan pelaksanaan Destana.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

6.1. Instrumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring adalah sebuah cara untuk mengidentifikasi aktifitas pada setiap tahapan dari sebuah kegiatan. Monitoring merupakan proses berkelanjutan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan serta pengungkapan masalah dari sebuah kegiatan sehingga bisa memberikan umpan balik guna peningkatan kualitas kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Secara fungsi monitoring lebih difokuskan untuk menilai apakah input yang dilaksanakan bisa menghasilkan output yang dituju sedangkan evaluasi berfungsi untuk mengidentifikasi dampak dari sebuah kegiatan dengan mengurangi dan menghilangkan dampak negatif dari sebuah kegiatan untuk masa selanjutnya.

Monitoring dan evaluasi merupakan proses berkesinambungan yang meliputi pengumpulan, pemilihan dan pemrosesan data tentang pelaksanaan kegiatan serta pencatatan progres kemajuan yang dicapai sampai dengan dampak dari adanya kegiatan tersebut. Monitoring dan evaluasi pembentukan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana) dimulai dari tahap awal pelaksanaan sampai dengan tahap akhir pelaksanaan dengan lingkup kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembentukan atau pengembangan Destana.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan destana diawali melalui tahap identifikasi visi, tujuan, rencana kerja dari organisasi perangkat daerah, lembaga non pemerintah, universitas dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam pengelolaan risiko bencana. Dilanjutkan dengan identifikasi dan evaluasi proses pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan pelaksanaan. Untuk itu diperlukan instrumen monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pembentukan dan pengembangan Destana. Instrumen monitoring, evaluasi dan pelaporan yang

digunakan pada paduan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan Destana sebagaimana tertuang dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1
Instrumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembentukan dan Pengembangan Destana

| NO | Kegiatan | Unsur/Aspek Pemantauan | Indikator | Instrumen Pemantauan |
|----|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 1 | Tahap Awal | Perencanaan | Program, Kegiatan dan Anggaran Terkait Aspek Destana | RPJMD, Tujuan/Visi, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, Lembaga/Organisasi |
| 2 | Tahap Pelaksanaan | Kualitas dan akses layanan dasar | Pelaksanaan Kegiatan | Kerangka Acuan Kerja, Tinjauan Lapangan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| | Dasar sistem penanggulangan bencana | | | |
| | Pengelolaan risiko bencana | | | |
| | Kesiapsiagaan darurat | | | |
| | Kesiapsiagaan pemulihan | | | |
| 3 | Tahap Akhir | Pengendalian dan Pengawasan | Data pembentukan Destana | Website/Dashboard/Laporan Pelaksanaan Pembentukan Destana |

6.2. Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah sebuah prosedur yang diterapkan untuk mencapai maksud dan tujuan dari sebuah kegiatan. Prosedur monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan dibangun dalam pembentukan dan pengembangan Destana merupakan mekanisme yang dibangun untuk mengidentifikasi kegiatan Destana melalui 4 (empat) pendekatan yakni:

1. Pendekatan Konteks dengan melakukan identifikasi tujuan, visi dan misi organisasi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi organisasi/lembaga yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pembentukan Destana.
2. Pendekatan input dilakukan melalui identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan Destana.
3. Pendekatan proses dilakukan dengan mengidentifikasi metode pelaksanaan dan memeriksa pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan apakah telah sesuai antara pelaksanaan dan rencana yang dibuat.
4. Pendekatan evaluasi dilakukan untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai capaian-capaian program yang telah dilaksanakan dalam pembentukan dan pengembangan Destana.

Berdasarkan 4 (empat) pendekatan diatas maka dibuat mekanisme monitoring dan evaluasi dalam bentuk form isian (lihat lampiran).

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pedoman pelaksanaan Destana dilakukan oleh Bappeda berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Pelaksanaan Destana di Provinsi NTB ini merupakan arahan dan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pencapaian ketangguhan Desa/Kelurahan dalam menghadapi bencana di Daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Komitmen dan dukungan dari berbagai pihak (Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, Media dan pemangku kepentingan lainnya) diperlukan guna pencapaian tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan Destana.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

LAMPIRAN-1: Data Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Hingga 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kota Mataram

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|-----|-------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | Sekarbela | Jempong Baru | 2011, 2015 | BPBD, LSM Islamic Relief |
| 2 | Sekarbela | Tanjung Karang | 2018 | Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 3 | Ampenan | Ampenan Selatan | 2015 | BPBD, LSM Islamic Relief |
| 4 | Ampenan | Bintaro | | LSM Islamic Relief, PMI |
| 5 | Ampenan | Ampenan Tengah | | |
| 6 | Cakranegara | Babakan | | Dinas Sosial NTB (KSB) |

Sumber: BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lombok Barat

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|-----|-----------|------------------|-------|------------------------------------|
| 1 | Sekotong | Pelangan | | LSM PSP |
| 2 | Sekotong | Taman Baru | | LSM PSP |
| 3 | Sekotong | Sekotong Tengah | | PMI |
| 4 | Sekotong | Cendi Manik | | LSM PSP |
| 5 | Lembar | Lembar Selatan | 2013 | BPBD, PMI |
| 6 | Lembar | Sekotong Timur | | LSM PSP |
| 7 | Lembar | Mareje | | LSM PSP |
| 8 | Lembar | Mareje Timur | | LSM PSP |
| 9 | Lembar | Jembatan Gantung | | LSM PSP |
| 10 | Lembar | Eyat Mayang | | LSM PSP |
| 11 | Lembar | Labuan Tereng | 2013 | BPBD, PMI |
| 12 | Gerung | Banyu Urip | | LSM PSP |
| 13 | Gerung | Kebon Ayu | | LSM PSP |
| 14 | Gerung | Gapuk | | LSM PSP |
| 15 | Gerung | Gerung Utara | | LSM PSP, Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 16 | Gerung | Babussalam | | LSM PSP |
| 17 | Gerung | Tempos | | LSM PSP |
| 18 | Gerung | Gerung Selatan | | LSM PSP |
| 19 | Gerung | Taman Ayu | | LSM PSP, LSM Islamic Relief |

| | | | | |
|----|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| 20 | Gerung | Suka Makmur | 2016 | Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 21 | Labuapi | Kuranji | | PMI |
| 22 | Labuapi | Kuranji Dalang | | |
| 23 | Kuripan | Kuripan Selatan | | LSM PSP |
| 24 | Kuripan | Kuripan | | LSM PSP |
| 25 | Kuripan | Kuripan Utara | | LSM PSP |
| 26 | Kuripan | Jagaraga | | LSM PSP |
| 27 | Kuripan | Giri Sasak | | LSM PSP |
| 28 | Narmada | Lembuak | 2017 | BPBD, LSM Muslim Aid |
| 29 | Narmada | Badrain | 2018 | BPBD, LSM Muslim Aid |
| 30 | Narmada | Sesaot | | |
| 31 | Lingsar | Gegerung | | |
| 32 | Lingsar | Batu Kumbung | | |
| 33 | Lingsar | Karang Bayan | | |
| 34 | Gunungsari | Guntur Macan | 2016 | BPBD |
| 35 | Gunungsari | Gelangsar | 2019-2020 | KONSEPSI |
| 36 | Gunungsari | Jati Sela | | PMI |
| 37 | Gunungsari | Dopang | | |
| 38 | Batulayar | Senteluk | 2011 | BPBD |
| 39 | Batulayar | Meninting | | LSM PSP, LSM Muslim Aid |
| 40 | Batulayar | Sandik | | LSM PSP, Yayasan Skala |
| 41 | Batulayar | Batulayar Barat | | LSM PSP |
| 42 | Batulayar | Pusuk Lestari | | LSM PSP |
| 43 | Batulayar | Batu Layar | | |

Sumber: BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lombok Tengah

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|-----|-------------|----------------|------------|------------------------|
| 1 | Pringgarata | Pemepek | 2015, 2016 | BPBD, LSM Beruqaq Desa |
| 2 | Pringgarata | Sepakek | 2016 | LSM Beruqaq Desa |
| 3 | Pujut | Mertak | 2016 | BPBD, KONSEPSI |
| 4 | Pujut | Sengkol | | KONSEPSI |
| 5 | Pujut | Kuta | 2018 | BPBD |
| 6 | Pujut | Prabu | | |

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|-----|---------------------|----------------|------------------------|---|
| 7 | Pujut | Tumpak | | |
| 8 | Praya | Tiwu Galih | 2016, 2017 | LSM Berugaq Desa, BPBD |
| 9 | Praya | Bunut Baok | 2016 | LSM Berugaq Desa |
| 10 | Praya Barat | Selong Blanak | 2013, 2018 | LSM Berugaq Desa, BPBD |
| 11 | Praya Barat | Mekar Sari | 2013 | LSM Berugaq Desa |
| 12 | Batukliang | Aik Darek | 2016 | LSM Berugaq Desa |
| 13 | Batukliang | Selebung | 2016 | LSM Berugaq Desa |
| 14 | Batukliang | Tampak Siring | 2016 | LSM Berugaq Desa |
| 15 | Batukliang Utara | Karang Sidemen | 2018 | BPBD Provinsi NTB, LSM Berugaq Desa |
| 16 | Batukliang Utara | Aik Berik | 2018, 2019- 2020 | BPBD, KONSEPSI |
| 17 | Batukliang Utara | Mas Mas | 2016 | LSM Berugaq Desa |
| 18 | Batukliang Utara | Aik Bukak | 2016 | LSM Berugaq Desa |
| 19 | Batukliang Utara | Setiling | 2016 | LSM Berugaq Desa |
| 20 | Batukliang Utara | Teratak | 2016 | LSM Berugaq Desa |
| 21 | Batukliang Utara | Lantan | 2016 | LSM Berugaq Desa |
| 22 | Batukliang Utara | Tanak Beak | 2016 | LSM Berugaq Desa |
| 23 | Praya Timur | Kidang | | Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 24 | Praya Barat Daya | Montong Sapah | 2014 | LSM Berugaq Desa |
| 25 | Praya Barat Daya | Kabul | 2014 | LSM Berugaq Desa |
| 26 | Praya Barat Daya | Batu Jangkih | 2014 | LSM Berugaq Desa |
| 27 | Praya Barat Daya | Montong Ajan | 2014 | LSM Berugaq Desa |
| 28 | Praya Barat Daya | Pandan Indah | 2014 | LSM Berugaq Desa |
| 29 | Janapria | Pendem | 2015 | LSM Berugaq Desa |
| 30 | Kopang | Dasan Baru | 2015 | LSM Berugaq Desa |

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|-----|-----------|----------------|-------|------------------|
| 31 | Kopang | Wajangesang | 2015 | LSM Beruqaq Desa |
| 32 | Kopang | Aik Bual | 2015 | LSM Beruqaq Desa |

Sumber: BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lombok Timur

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|-----|-------------|-------------------|-----------|---|
| 1 | Pringgasele | Timbanuh | 2011 | BPBD |
| 2 | Pringgasele | Pringgasele Timur | 2021 | BPBD |
| 3 | Selong | Selong | 2015 | BPBD |
| 4 | Sakra Timur | Lenting | 2016 | BPBD |
| 5 | Suele | Mekar Sari | 2017 | BPBD |
| 6 | Suele | Ketangga | | |
| 7 | Suele | Perigi | | |
| 8 | Suele | Sapit | | |
| 9 | Suele | Selaparang | | |
| 10 | Suele | Suela | | |
| 11 | Suele | Suntalangu | | |
| 12 | Semabalun | Semabalun Lawang | 2014 | LSM Samawa Center, Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 13 | Semabalun | Semabalun Bumbung | | LSM Samawa Center, Yayasan Skala (Review), Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 14 | Semabalun | Bilok Petung | | LSM Samawa Center |
| 15 | Semabalun | Sajang | | LSM Samawa Center |
| 16 | Semabalun | Semabalun | | |
| 17 | Sambelia | Belanting | | LSM Samawa Center, PMI |
| 18 | Sambelia | Bagik Manis | | |
| 19 | Sambelia | Obel-obel | 2019-2020 | LSM Samawa Center, Yayasan |

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|-----|--------------|------------------------|-------|--|
| | | | | Skala, KONSEPSI |
| 20 | Sambelia | Madayin | | Dinas Sosial NTB (KSB), KONSEPSI |
| 21 | Sambelia | Labuhan Pandan | | |
| 22 | Sambelia | Padak Guar | | |
| 23 | Sambelia | Sambelia | | |
| 24 | Sambelia | Senanggalih | | |
| 25 | Sambelia | Sugian | | |
| 26 | Sambelia | Dara Kunci | | Dinas Sosial NTB (KSB), PMI |
| 27 | Keruak | Pijot | | LSM Samawa Center |
| 28 | Keruak | Tanjung Luar | | LSM Samawa Center |
| 29 | Keruak | Sepit | 2021 | BPBD |
| 30 | Jerowaru | Seriwe | | LSM Samawa Center |
| 31 | Jerowaru | Pandan Wangi | | LSM Samawa Center |
| 32 | Jerowaru | Batu Nampar | | Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 33 | Jerowaru | Batu Nampar Selatan | 2016 | Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 34 | Jerowaru | Jerowaru | | PMI |
| 35 | Jerowaru | Pare Mas | | |
| 36 | Jerowaru | Pemongkong | | |
| 37 | Aikmel | Kembang Kerang Daya | | KONSEPSI |
| 38 | Labuhan Haji | Suryawangi | | |
| 39 | Pringgabaya | Gunung Malang | | |
| 40 | Pringgabaya | Labuhan Lombok | | |
| 41 | Pringgabaya | Pohgading Timur | | |
| 42 | Pringgabaya | Pringgabaya | | |
| 43 | Pringgabaya | Pringgabaya Utara | | |

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|-----|----------------|----------------|-------|-----------|
| 44 | Pringgabaya | Seruni Mumbul | | |
| 45 | Lenek | Lenek Daya | | |
| 46 | Montong Gading | Pesanggrahan | | KONSEPSI |

Sumber: BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lombok Utara

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|-----|-----------|----------------|-------|--|
| 1 | Gangga | Bentek | 2011 | BPBD |
| 2 | Gangga | Genggelang | 2019 | BPBD |
| 3 | Gangga | Sambik Bangkol | | |
| 4 | Gangga | Rempek | | |
| 5 | Gangga | Gondang | | |
| 6 | Gangga | Seelos | | |
| 7 | Gangga | Darussalam | | |
| 8 | Gangga | Segara Katon | | |
| 9 | Pemenang | Pemenang Barat | 2012 | BPBD, LSM Muslim Aid, Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 10 | Pemenang | Gili Indah | 2012 | BPBD |
| 11 | Pemenang | Malaka | | LSM Muslim Aid |
| 12 | Pemenang | Pemenang Timur | | LSM Muslim Aid |
| 13 | Pemenang | Manggala | 2011 | Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 14 | Tanjung | Sigar Penjalin | 2019 | Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 15 | Tanjung | Teniga | 2019 | BPBD |
| 16 | Tanjung | Tegal Maja | | |
| 17 | Tanjung | Tanjung | | |
| 18 | Tanjung | Sokong | | |
| 19 | Tanjung | Medana | | |
| 20 | Tanjung | Jenggala | | |
| 21 | Tanjung | Sama Guna | | |
| 22 | Bayan | Bayan | 2019 | BPBD |

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|-----|-----------|----------------|---------------|-----------|
| 23 | Bayan | Senaru | 2019 | BPBD |
| 24 | Bayan | Karang Bajo | 2019 | BPBD |
| 25 | Bayan | Sukadana | 2019 | BPBD |
| 26 | Bayan | Loloan | 2019 | BPBD, LSM |
| 27 | Bayan | Anyar | 2013, 2019 | BPBD, LSM |
| 28 | Bayan | Sambik Elen | 2020 | KONSEPSI |
| 29 | Bayan | Akar-Akar | 2020 | KONSEPSI |
| 30 | Bayan | Andalan | 2020 | KONSEPSI |
| 31 | Bayan | Gunjan Asri | 2020 | KONSEPSI |
| 32 | Kayangan | Sesait | | |
| 33 | Kayangan | Selengan | | |
| 34 | Kayangan | Santong | | |
| 35 | Kayangan | Kayangan | | |
| 36 | Kayangan | Gumantar | | |

Sumber: BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Sumbawa Barat

| No | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|----|-----------|----------------|-------|---------------------------|
| 1 | Taliwang | Sampir | 2016 | PMI |
| 2 | Taliwang | Labuhan lalar | | |
| 3 | Taliwang | Sermong | | |
| 4 | Seteluk | Tapir | 2018 | |
| 5 | Seteluk | Seteluk Tengah | | |
| 6 | Brang Rea | Baru | 2019 | |
| 7 | Brang Rea | Sapugara Bree | | |
| 8 | Brang Rea | Tepas | | |
| 9 | Maluk | Pasir Putih | 2019 | Dinas Sosial NTB (KSB) |

Sumber: BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Sumbawa

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|-----|---------------|-----------------|-------|------------------------|
| 1 | Unte Iwes | Pelat | 2016 | |
| 2 | Sumbawa | Sama Pulin | | Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 3 | Moyo Hilir | Kakiang | | KONSEPSI |
| 4 | Moyo Hilir | Batubangka | | KONSEPSI |
| 5 | Moyo Hilir | Berare | | KONSEPSI |
| 6 | Moyo Utara | Songkar | | KONSEPSI |
| 7 | Moyo Utara | Baru Tahan | | KONSEPSI |
| 8 | Moyo Utara | Kukin | | KONSEPSI |
| 9 | Alas | Baru | | |
| 10 | Alas | Kalimango | | |
| 11 | Labuhan Badas | Karang Dima | | |
| 12 | Labuhan Badas | Labuhan Sumbawa | | |
| 13 | Lopok | Berora | | |
| 14 | Lopok | Lopok Baru | | |

Sumber: BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Dompu

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|-----|-----------|----------------|-------|------------------------|
| 1 | Dompu | Kari Jawa | 2015 | |
| 2 | Dompu | Potu | 2015 | |
| 3 | Dompu | Katua | | |
| 4 | Dompu | Karamabura | | |
| 5 | Dompu | Mangge Nae | | |
| 6 | Dompu | Manggeasi | | |
| 7 | Woja | Kandai Dua | 2017 | |
| 8 | Woja | Wawonduru | | Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 9 | Woja | Riwo | 2015 | World relief |
| 10 | Pekat | Tambora | | Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 11 | Pekat | Doropeti | 2015 | Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 12 | Pekat | Beringin Jaya | | |

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|-----|------------|----------------|-------|--------------|
| 13 | Pekat | Calabai | | |
| 14 | Pekat | Pekat | | |
| 15 | Pekat | Kadindi | | |
| 16 | Pekat | Kadindi Barat | | |
| 17 | Pekat | Karombo | | |
| 18 | Pekat | Nangamiro | | |
| 19 | Manggelewa | Lancijaya | 2014 | World relief |
| 20 | Manggelewa | Kwangko | 2015 | World relief |
| 21 | Manggelewa | Nangatumpu | 2015 | World relief |
| 22 | Kempo | Soro | 2014 | World relief |
| 23 | Kempo | Soro Barat | 2014 | World relief |
| 24 | Kempo | Doro Kobo | | |
| 25 | Kempo | Kempo | | |
| 26 | Kempo | Songgaja | | |
| 27 | Kempo | Ta'a | | |
| 28 | Kempo | Tolokalo | | |
| 29 | Hu'u | Hu'u | 2014 | World relief |
| 30 | Hu'u | Jala | 2015 | World relief |
| 31 | Hu'u | Cempijaya | 2014 | World relief |
| 32 | Pajo | Jambu | 2015 | World relief |
| 33 | Pajo | Woko | 2014 | World relief |
| 34 | Pajo | Lune | | |
| 35 | Kilo | Kramat | | |
| 36 | Kilo | Lasi | | |
| 37 | Kilo | Taropo | | |

Sumber: BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Bima

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|-----|------------|----------------|-------|--------------------------------|
| 1 | Wera | Sangiang | 2014 | LP2DER, Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 2 | Wera | Tadewa | 2014 | LP2DER |
| 3 | Wera | Oi Tui | 2015 | LP2DER |
| 4 | Wawo | Maria | 2017 | LP2DER, Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 5 | Wawo | Maria Utara | 2017 | LP2DER |
| 6 | Wawo | Pesa | 2017 | LP2DER |
| 7 | Wawo | Tarlawi | 2017 | LP2DER |
| 8 | Bolo | Darusallam | 2013 | Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 9 | Donggo | Palama | 2012 | LP2DER |
| 10 | Donggo | Rora | 2012 | LP2DER |
| 11 | Donggo | Bumi Pajo | 2012 | LP2DER |
| 12 | Donggo | Mbawa | 2014 | World relief |
| 13 | Ambalawi | Nipa | 2012 | LP2DER |
| 14 | Ambalawi | Talapiti | 2012 | LP2DER |
| 15 | Ambalawi | Toloata | 2012 | LP2DER |
| 16 | Ambalawi | Rite | 2012 | LP2DER |
| 17 | Ambalawi | Kole | 2012 | LP2DER |
| 18 | Woha | Donggo Bolo | 2012 | LP2DER |
| 19 | Woha | Risa | 2012 | LP2DER |
| 20 | Woha | Penapali | 2012 | LP2DER |
| 21 | Woha | Dadi Bou | 2012 | LP2DER |
| 22 | Woha | Kalampa | 2012 | LP2DER |
| 23 | Woha | Nisa | 2018 | LP2DER |
| 24 | Woha | Naru | 2018 | LP2DER |
| 25 | Madapangga | Ndano | 2012 | LP2DER |
| 26 | Madapangga | Ncandi | 2014 | World relief |
| 27 | Madapangga | Rade | 2014 | World relief |

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|-----|-----------|----------------|-------|------------------------|
| 28 | Sanggar | Boro | 2016 | LP2DER |
| 29 | Sanggar | Piong | 2016 | LP2DER |
| 30 | Sanggar | Kore | 2016 | LP2DER |
| 31 | Lambitu | Kuta | 2018 | LP2DER |
| 32 | Lambitu | Kaowa | 2018 | LP2DER |
| 33 | Lambitu | Sambori | 2018 | LP2DER |
| 34 | Sape | Sangia | 2015 | Dinas Sosial NTB (KSB) |

Sumber: BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kota Bima

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|-----|---------------|-------------------------|-------|------------------------|
| 1 | Rasanae Timur | Dodu | 2015 | BPBD |
| 2 | Rasanae Timur | Nungga | 2012 | LP2DER |
| 3 | Rasanae Timur | Kodo | | |
| 4 | Rasanae Timur | Kumbe | | |
| 5 | Rasanae Timur | Lampe | | |
| 6 | Rasanae Timur | Lelamare | | |
| 7 | Rasanae Timur | Oimba | | |
| 8 | Asakota | Jatiwangi | 2012 | LP2DER |
| 9 | Asakota | Melayu | | Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 10 | Asakota | Kolo | 2012 | LP2DER |
| 11 | Asakota | Jatibaru | | |
| 12 | Asakota | Jatibaru Timur | | |
| 13 | Raba | Kendo | 2012 | LP2DER |
| 14 | Raba | Penaraga | | Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 15 | Raba | Ntobo | 2012 | LP2DER |
| 16 | Raba | Pananae | | |
| 17 | Raba | Rabangodu Selatan | | |
| 18 | Raba | Rabangodu Selatan Utara | | |
| 19 | Raba | Rite | | |
| 20 | Raba | Rontu | | |

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tahun | Pelaksana |
|-----|---------------|----------------|-------|------------------------|
| 21 | Rasanae Barat | Tanjung | 2012 | LP2DER |
| 22 | Rasanae Barat | Paruga | | Dinas Sosial NTB (KSB) |
| 23 | Rasanae Barat | Dara | | |
| 24 | Rasanae Barat | Nae | | |
| 25 | Rasanae Barat | Pane | | |
| 26 | Rasanae Barat | Sarae | | |
| 27 | Mpunda | Manggemaci | 2015 | BPBD |
| 28 | Mpunda | Metakando | 2017 | BPBD |
| 29 | Mpunda | Lewirato | | |
| 30 | Mpunda | Mande | | |
| 31 | Mpunda | Manggonao | | |
| 32 | Mpunda | Panggi | | |
| 33 | Mpunda | Penatoi | | |
| 34 | Mpunda | Sadia | | |
| 35 | Mpunda | Sambinae | | |
| 36 | Mpunda | Santi | | |

Sumber: BPBD NTB, 2021

LAMPIRAN-2.1 : Peran Para Pihak dalam Pelaksanaan Destana

1. ASPEK LEGISLASI: Penyusunan peraturan desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat Desa

| NO | KEGIATAN | OUTPUT | RINCIAN KEGIATAN | PELAKSANA | SUMBER PENDANAAN | MITRA PEMBANGUNAN | KLASIFIKASI DESA | | |
|----|--|---|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | U | M | P |
| 1 | Fasilitasi Peraturan Desa Penanggulangan Risiko Bencana (PRB). | Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa atau kelurahan yang memperhatikan kearifan lokal pengurangan risiko bencana NTB. | Sosialisasi Peraturan Desa PRB | BPBD Kab/Kota | APBD Kab/Kota | Universitas, LSM, Forum PRB Prov/Kab | | | |
| | | | Sosialisasi Dana Desa untuk PRB | DPMPD Kab/Kota Pemerintah Desa | APBD Kab/Kota DANA Desa | | | | |
| | | | Sosialisasi tata cara Penyusunan Peraturan Desa | DPMPD Prov/Kab/Kota | APBD Kab/Kota | | | | |
| 2 | Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Penanggulangan Risiko Bencana. | Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa atau kelurahan memperhatikan kearifan lokal pengurangan risiko bencana NTB. | Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa PRB. | BPBD Kab/Kota | APBD Kab/Kota | Universitas, LSM, Forum PRB Prov/Kab | | | |

| NO | KEGIATAN | OUTPUT | RINCIAN KEGIATAN | PELAKSANA | SUMBER PENDANAAN | MITRA PEMBANGUNAN | KLASIFIKASI DESA | | |
|----|-------------------------------|---|---|----------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | U | M | P |
| 3 | Penetapan Peraturan Desa PRB. | Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum setingkat di kelurahan memperhatikan kearifan lokal pengurangan risiko bencana NTB. | Pendampingan Penetapan Peraturan Desa PRB. | DPMPD Kab/Kota | APBD Prov/Kab/Kota | Universitas, LSM, Forum PRB Prov/Kab | | | |
| | | | Bimbingan Teknis Pengesahan Peraturan Desa PRB. | DPMPD Kab/Kota | APBD Prov/Kab/Kota | | | | |

Keterangan: *Desa disini termasuk Desa dan Kelurahan

2. **ASPEK PERENCANAAN: Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa, yang meliputi: rencana kontijensi bila menghadapi ancaman tertentu, dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (Pengurangan Risiko Bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)**

| NO | KEGIATAN | OUTPUT | RINCIAN KEGIATAN | PELAKSANA | SUMBER PENDANAAN | MITRA PEMBANGUNAN | KLASIFIKASI DESA | | |
|----|--|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | U | M | P |
| 1 | Fasilitasi Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Desa/Kelurahan | Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB yang | Bimbingan Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Desa/Kelurahan | BPBD Kab/Kota Pemerintah Desa | APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR | LSM, FPRB Prov/Kab/Kota | | | |

| NO | KEGIATAN | OUTPUT | RINCIAN KEGIATAN | PELAKSANA | SUMBER PENDANAAN | MITRA PEMBANGUNAN | KLASIFIKASI DESA | | |
|----|---|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | U | M | P |
| | Fasilitasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa/Kelurahan | memperhatikan modal sosial di masyarakat NTB. | Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencan (RPB) Desa/Kelurahan | BPBD Kab/Kota Pemerintah Desa | APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR | | | | |
| | Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi PRB Komunitas | | Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi PRB Komunitas | BPBD Kab/Kota Pemerintah Desa | APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR | | | | |
| | Fasilitasi Penyusunan Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan | | Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan | BPBD Kab/Kota Pemerintah Desa | APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR | | | | |
| 2 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Desa/Kelurahan | Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa yang memperhatikan modal sosial di masyarakat NTB. | Bimbingan Teknis penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Desa/Kelurahan | BPBD Kab/Kota Pemerintah Desa | APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR | LSM, FPRB Prov/Kab/Kota | | | |
| | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa/Kelurahan | | Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan | BPBD Kab/Kota Pemerintah Desa | APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR | | | | |

| NO | KEGIATAN | OUTPUT | RINCIAN KEGIATAN | PELAKSANA | SUMBER PENDANAAN | MITRA PEMBANGUNAN | KLASIFIKASI DESA | | |
|----|--|--|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | U | M | P |
| | | | Bencan (RPB) Desa/Kelurahan | | | | | | |
| | Penyusunan Rencana Aksi PRB Komunitas | | Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi PRB Komunitas | BPBD Kab/Kota | APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR | | | | |
| | Penyusunan Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan | | Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan | BPBD Kab/Kota | APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR | | | | |
| 3 | Pemaduan dokumen perencanaan PB tingkat desa dalam RPJMDes dan RKPDes. | Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes yang memperhatikan modal sosial di masyarakat NTB. | Lokakarya Pemaduan dokumen perencanaan PB tingkat desa dalam RPJMDes dan RKPDes. | BPBD Kab/Kota | APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR | LSM, FPRB Prov/Kab/Kota | | | |

3. **ASPEK KELEMBAGAAN:** Pembentukan kelembagaan *pentahelix* (lintas sektor) Desa/kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana

| NO. | KEGIATAN | OUTPUT | RINCIAN KEGIATAN | PELAKSANA | SUMBER PENDANAAN | MITRA PEMBANGUNAN | KLASIFIKASI DESA | | |
|-----|--|--|---|---|---|--------------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | U | M | P |
| 1 | Assesment kelembagaan <i>pentahelix</i> (lintas sektor) Desa/Kelurahan | Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk kelembagaan <i>pentahelix</i> (lintas sektor) dalam penganggulangan bencana yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat | Pemetaan para aktor kelembagaan <i>pentahelix</i> (lintas sektor) | BPBD Prov/Kab/Kota | APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR | LSM, FPRB Prov/Kab | | | |
| 2 | Fasilitasi Pembentukan/ke lembagaan <i>pentahelix</i> (lintas sektor) Desa/Kelurahan | Adanya kelembagaan <i>pentahelix</i> (lintas sektor) yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, | Pembentukan Forum PRB | BPBD Pemerintah Desa | APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR | LSM, FPRB Prov/Kab | | | |
| | | | Pembentukan Tim Relawan | BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan | APBD Prov/Kab/Kota | | | | |

| NO. | KEGIATAN | OUTPUT | RINCIAN KEGIATAN | PELAKSANA | SUMBER PENDANAAN | MITRA PEMBANGUNAN | KLASIFIKASI DESA | | |
|-----|--|---|---|---|--|--------------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | U | M | P |
| | | tetapi belum berfungsi penuh dan aktif | | Hidup dan Kehutanan (Prov/Kab/Kota) | | | | | |
| 3 | Pendampingan kelembagaan pentahelix (lintas sektor) Desa/kelurahan yang telah terbentuk untuk memastikan berfungsi dengan aktif dan terdiri dari keterwakilan unsur-unsur perempuan, kelompok rentan dan wakil pemerintah desa/kelurahan | Adanya kelembagaan pentahelix (lintas sektor) yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa/kelurahan, yang berfungsi dengan aktif. | Bimbingan Teknis dan Monitoring kelembagaan yang terbentuk Bimbingan Teknis Program Keluarga Tangguh Bencana | BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Prov/Kab/Kota) BPBD Kab/Kota Pemerintah Desa | APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR | LSM, FPRB Prov/Kab | | | |

4. **ASPEK PENDANAAN:** Rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD kabupaten/kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan).

| NO. | KEGIATAN | OUTPUT | RINCIAN KEGIATAN | PELAKSANA | SUMBER PENDANAAN | MITRA PEMBANGUNAN | KLASIFIKASI DESA | | |
|-----|--|-------------------------------------|--|--|---|--------------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | U | M | P |
| 1 | Advokasi Kebijakan Penganggaran Daerah dan Desa terkait Dana Desa untuk PB | Alokasi dana desa untuk PB di Desa. | Bimbingan teknis Advokasi Kebijakan Daerah dan Desa terkait Dana Desa untuk PB | BPBD Prov/Kab/Kota DPMPD Prov/Kab/Kota Pemerintah Desa | APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR | LSM, FPRB Prov/Kab | | | |
| | | | Pendampingan Desa dalam mengakses pendanaan dari sumber lainnya | | | | | | |

5. **ASPEK PENGEMBANGAN KAPASITAS:** Pelatihan, pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana

| NO. | KEGIATAN | OUTPUT | RINCIAN KEGIATAN | PELAKSANA | SUMBER PENDANAAN | MITRA PEMBANGUNAN | KLASIFIKASI DESA | | |
|-----|---|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | U | M | P |
| 2 | Pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif desa/kelurahan untuk mengurangi kerentanan | Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji | Inisiasi kegiatan-kegiatan ekonomi produktif desa/kelurahan untuk mengurangi kerentanan | Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Desa | APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR | Universitas, LSM, Forum PRB Prov/Kab | | | |

| NO. | KEGIATAN | OUTPUT | RINCIAN KEGIATAN | PELAKSANA | SUMBER PENDANAAN | MITRA PEMBANGUNAN | KLASIFIKASI DESA | | |
|-----|--|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | U | M | P |
| 3 | Pendampingan dan pembukaan akses pasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomi produktif desa/kelurahan untuk mengurangi kerentanan | Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan. | Bimbingan Teknis dan akses pasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomi produktif desa/kelurahan untuk mengurangi kerentanan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov/kab/Kota Pemerintah Desa | APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR | Universitas, LSM, Forum PRB Prov/Kab | | | |

6. **ASPEK PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA:** Kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan resiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

| NO. | KEGIATAN | OUTPUT | RINCIAN KEGIATAN | PELAKSANA | SUMBER PENDANAAN | MITRA PEMBANGUNAN | KLASIFIKASI DESA | | |
|-----|--|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | U | M | P |
| 1 | Pembangunan sarana fisik dan non fisik | Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan | Pembangunan Tempat evakuasi | Dinas Sosial Kab/Kota | APBD II | LSM, FPRB Prov/Kab, | | | |

| NO. | KEGIATAN | OUTPUT | RINCIAN KEGIATAN | PELAKSANA | SUMBER PENDANAAN | MITRA PEMBANGUNAN | KLASIFIKASI DESA | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------------|-----------|------------------|--------------------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | U | M | P |
| | sebagai respon darurat kebencanaan | kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana | sementara dan dapur umum | | | Universitas, Dunia Usaha | | | |
| Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih sementara | | | PUPR Kab/Kota | APBD II | | | | | |
| Pembenahan dan penataan akses Jalan yang rusak akibat bencana | | | PUPR Kab/Kota | APBD II | | | | | |
| Pembangunan Tempat Layanan Pendidikan Sementara | | | Dinas Pendidikan | APBD II | | | | | |
| Pengembangan sistem/SOP penilaian ketangguhan desa terhadap bencana | | | BPBD | APBD | | | | | |

| NO. | KEGIATAN | OUTPUT | RINCIAN KEGIATAN | PELAKSANA | SUMBER PENDANAAN | MITRA PEMBANGUNAN | KLASIFIKASI DESA | | |
|-----|--|---|--|--|------------------|--|------------------|---|---|
| | | | | | | | U | M | P |
| | | | Pengembangan Data Base Kebencanaan tingkat Provinsi | Dinas Informasi Komunikasi dan Statistik | APBD | | | | |
| | | | Pengembangan Data Base Kebencanaan tingkat Kabb/Kota | Dinas Informasi dan Komunikasi | APBD | | | | |
| | | | Pembangunan tempat layanan Kesehatan sementara | Dinas Kesehatan | APBD | | | | |
| 2 | Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis | Pembangunan sarana fisik dan non fisik sebagai upaya sistematis untuk pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan. | Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir | PUPR Kab/Kota | APBD | LSM, FPRB Prov/Kab, Universitas, Dunia Usaha | | | |
| | | | Penataan sistem komando tanggap darurat bencana | BPBD Kab/Kota | APBD | | | | |
| | | | Pelatihan perangkat desa daerah dalam tanggap darurat terhadap bencana | BPBD Kab/Kota | APBD | | | | |

| NO. | KEGIATAN | OUTPUT | RINCIAN KEGIATAN | PELAKSANA | SUMBER PENDANAAN | MITRA PEMBANGUNAN | KLASIFIKASI DESA | | |
|-----|----------|--------|--|---|------------------|-------------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | U | M | P |
| | | | Pembangunan kembali Rumah penduduk yang rusak akibat bencana | Dinas Perumahan dan Permukiman Kab/Kota | APBD | | | | |
| | | | Pembangunan Satuan Pendidikan yang aman akan bencana | Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota | APBD | | | | |
| | | | Penataan sarana prasarana air bersih akibat bencana | PUPR Kab/Kota | APBD | | | | |
| | | | Pembangunan akses jalan yang rusak akibat bencana | PUPR Kab/Kota | APBD | | | | |
| | | | Pembangunan sarana layanan Kesehatan aman bencana | Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota | APBD | | | | |

| NO. | KEGIATAN | OUTPUT | RINCIAN KEGIATAN | PELAKSANA | SUMBER PENDANAAN | MITRA PEMBANGUNAN | KLASIFIKASI DESA | | |
|-----|---|---|---|--|------------------|--|------------------|---|---|
| | | | | | | | U | M | P |
| 3 | Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana. | Pembangunan sarana fisik dan non fisik sebagai upaya sistematis untuk pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan yang berbasis pada perencanaan PB di desa/kelurahan yang tetap memperhatikan kearifan lokal NTB. | Penataan dan pemasangan rambu evakuasi dan tanda peringatan dini di wilayah rawan bencana | BPBD dan BMKG | APBD | LSM, FPRB Prov/Kab, Universitas, Dunia Usaha | | | |
| | | | Gladi kesiapsiagaan rutin di wilayah rawan bencana | BPBD Kab/Kota | APBD | | | | |
| | | | Penilaian secara rutin ketangguhan desa terhadap bencana | BPBD Kab/Kota | APBD | | | | |
| | | | Penataan tata ruang yang berdasarkan kajian dan manajemen risiko bencana. | PUPR Kab/Kota dan Dinas Perumahan dan Permukiman | APBD | | | | |
| | | | Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana | Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota | APBD | | | | |

| NO. | KEGIATAN | OUTPUT | RINCIAN KEGIATAN | PELAKSANA | SUMBER PENDANAAN | MITRA PEMBANGUNAN | KLASIFIKASI DESA | | |
|-----|----------|--------|--|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | U | M | P |
| | | | di Kawasan rawan bencana | | | | | | |
| | | | Pembentukan Tim Monitoring dan Pendampingan Program Keluarga Tangguh Bencana | BPBD Pemdes | APBD Dana Desa | | | | |
| | | | Pembentukan Layanan Kesehatan aman bencana di Kawasan rawan bencana | Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota | APBD | | | | |
| | | | Pembangunan Jalur Evakuasi yang permanen di Kawasan rawan bencana | PUPR Kab/Kota | APBD | | | | |

LAMPIRAN 2.2: Keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Ketangguhan Desa berdasarkan Urusan

| No | URUSAN | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|----|--|--|---|--|
| 1 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa |
| | | 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |
| 3 | Biro Hukum | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha |
| | | 2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana |

| No | URUSAN | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|----|---------------|--|--|--|
| | | | 2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana |
| | | | 3. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | a. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana |
| | | | | b. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi |
| 5 | Sosial | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | a. Penyediaan Perumahan |
| | | | | b. Penyediaan Sandang |
| | | | | c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi |
| | | | | d. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan |
| | | | | e. Pelayanan Dukungan Psikososial |
| 6 | Perindustrian | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 1. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi |

| No | URUSAN | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|----|--------------------------------|---|--|--|
| | | | 2. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan |
| | | | 3. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi |
| 7 | Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |
| 8 | Perdagangan | 1. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi |
| | | 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan |
| 9 | Dinas Perdagangan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri |
| 10 | Energi dan Sumber Daya Mineral | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum |

| No | URUSAN | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|----|-----------------------------------|---|---|--|
| | | | Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan |
| 11 | Lingkungan Hidup | 1. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | a. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan |
| | | | | b. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan |
| | | | | c. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial |
| | | 2. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup |
| 12 | Komunikasi dan Informatika | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | a. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik |
| | | | | b. Pelayanan Informasi Publik |
| 13 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | a. Pembangunan Jalan |
| | | | | b. Rehabilitasi Jalan |
| | | 2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan |

| No | URUSAN | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|----|-----------|---|--|--|
| | | 3. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
| 14 | Kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | a. Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan |
| | | | | b. Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan |
| | | | | c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |
| | | | | d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) |
| | | | | e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |

Tabel Form Monitoring Dan Evaluasi (masuk dalam lampiran)

| | | |
|-----------------|---|---|
| Nama Evaluator: | | Nomor Form : |
| 1. | | Tanggal Pelaksanaan : |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 1 | Nama Kegiatan | |
| 2 | Nama Organisasi/Lembaga Pelaksana | |
| 3 | Dasar Hukum | |
| 4 | Pendanaan | Rp. |
| 5 | Lokasi Pelaksanaan | |
| 6 | Metode Pelaksanaan | |
| 7 | Aspek Destana yang diintervensi | |
| | a. Legislasi | |
| | b. Perencanaan | |
| | c. Kelembagaan | |
| | d. Pengembangan Kapasitas | |
| | e. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | |
| 8 | Target yang dicapai | |
| 9. | Pedoman/Referensi Monitoring dan Evaluasi | <ul style="list-style-type: none"> • SNI 8357 : 2017, tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana |
| 10 | Hasil Monitoring dan Evaluasi | |

LAMPIRAN-3: Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Fasilitator Penilai Destana

I. PERSYARATAN FASILITATOR

Fasilitator Penilai Destana dapat berasal dari ASN dan non ASN yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dan diberi tugas oleh instansi atau lembaga yang berwenang dalam melakukan penilaian ketangguhan desa/ kelurahan.

Persyaratan fasilitator penilai Destana adalah :

- a. Pendidikan minimal SMA atau sederajat
- b. Usia minimal 20 Tahun yang dibuktikan dengan dokumen resmi
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Mampu berkomunikasi, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan.
- e. Mampu dan menguasai penggunaan komputer dan teknologi informasi lainnya
- f. Mendapatkan rekomendasi dari FPRB
- g. Pernah Mengikuti pendidikan / pelatihan Fasilitator penilaian Destana
- h. Menandatangani pakta integritas

II. KODE ETIK

Kode etik fasilitator penilai DESTANA adalah norma atau asas yang mengandung nilai-nilai dan aturan berperilaku yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator penilai DESTANA. Penyusunan kode etik dimaksudkan agar fasilitator penilai DESTANA dapat meningkatkan kualitas diri dalam melaksanakan tugas secara profesional sehingga penilaian DESTANA dapat dilakukan dengan bertanggungjawab. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun Norma dan Kode Etik Fasilitator Penilai DESTANA.

A. Norma fasilitator penilaian DESTANA:

1. Kejujuran
Proses verifikasi dan validasi penilaian aspek-aspek pelaksanaan DESTANA dilakukan secara jujur sehingga data dan informasi yang didapatkan bersifat obyektif dan tidak merugikan parapihak.

2. Keadilan
Fasilitator penilaian DESTANA dilakukan dengan metode dan pedoman penilaian yang terstandar untuk semua desa yang akan dinilai.
3. Profesionalisme
Fasilitasi penilaian DESTANA tidak diintervensi dan dipengaruhi oleh kepentingan siapapun untuk itu fasilitator penilai DESTANA wajib memahami dan menguasai metode dan pedoman penilaian DESTANA.
4. Integritas
Fasilitator penilai DESTANA menjunjung tinggi aturan dan pedoman pelaksanaan DESTANA dalam melaksanakan tugasnya.
5. Kesejajaran
Fasilitator penilai DESTANA sebagai bagian dari tim penilai sejajar kedudukannya dengan penilai lainnya
6. Keterbukaan
Fasilitator penilai DESTANA menjunjung tinggi keterbukaan dalam setiap proses penilaian yang dilakukan.
7. Independen
Fasilitator penilaian destana tidak terikat oleh kepentingan para pihak.

B. Kode Etik Fasilitator Penilai DESTANA

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas.
2. Bersikap adil, objektif dan independen.
3. Transparan dan Akuntabel.
4. Menghormati dan menghargai norma dan budaya setempat.
5. Menjaga kehormatan diri dalam prilaku dan perkataan.
6. Menjalin dan membangun kerjasama yang baik antar tim penilai.
7. Menciptakan suasana yang kondusif dan tanpa tekanan.
8. Melakukan penilaian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
9. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun selain dari hak sebagai penilai.

C. Sangsi Pelanggar Kode Etik

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Fasilitator Penilai DESTANA dilakukan oleh pejabat pemberi tugas, berupa : a. Teguran Lisan, b. Teguran Tertulis dan c. Pemberhentian.

III. PERENCANAAN

A. Pembentukan Tim Fasilitator Penilai DESTANA

1. BPBD Provinsi NTB dapat membentuk Tim Fasilitator Penilai DESTANA untuk mendukung Pencapaian DESTANA di Provinsi NTB.
2. Menyiapkan Surat Keputusan (S.K.) tentang Pembentukan Tim Fasilitator Penilai DESTANA oleh BPBD Provinsi NTB.
3. Tim Fasilitator Penilai DESTANA memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penilaian ketangguhan desa/kelurahan di Provinsi NTB.
4. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Tim Fasilitator Penilai DESTANA diberikan pelatihan dan sertifikasi melalui proses uji kompetensi.

B. Penyiapan Administrasi Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan

1. Tim Fasilitator Penilai DESTANA Menyiapkan Kelengkapan Administrasi Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Daftar Hadir Peserta
 - b. Format Penilaian DESTANA
 - c. Berita Acara
2. Contoh format kelengkapan administrasi pada poin (1) **terlampir** di dalam SOP.

C. Materi/Komponen Penilaian DESTANA

Tim Fasilitator penilai DESTANA menyiapkan materi/komponen yang digunakan untuk melakukan Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan. Materi/komponen tersebut terdiri dari:

| No. | Komponen |
|-----|--|
| 1 | Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana |
| 2 | Pencegahan dan Mitigasi |
| 3 | Kesiapsiagaan Darurat |
| 4 | Kesiapsiagaan Pemulihan |
| 5 | Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana |

D. Jadwal Penilaian DESTANA

Penilaian DESTANA dapat dilakukan secara reguler/rutin setiap tahun untuk mengukur capaian DESTANA di Provinsi NTB.

IV. PELAKSANAAN

Pelaksanaan penilaian mengacu pada Panduan Penilaian Ketangguhan Bencana Desa dan Kelurahan dari BNPB edisi terbaru pada saat penilaian akan dilaksanakan. Komponen, indikator-indikator penilaian dan jumlah pertanyaan disesuaikan dengan acuan edisi terbaru tersebut.

Penilaian ketangguhan desa/kelurahan dilaksanakan melalui diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*).

A. Lokasi dan Ruang

Lokasi diskusi di wilayah Desa/Kelurahan setempat. Ruang beserta fasilitas yang dipergunakan memadai baik dari segi jumlah partisipasi peserta, ramah difabel serta memungkinkan untuk diterapkan protokol kesehatan yang berlaku pada saat pelaksanaan FGD.

Peserta

Unsur peserta yang dilibatkan minimal terdiri dari:

1. Kepala Desa/Lurah;
2. Sekretaris Desa/Kelurahan;
3. Perwakilan BPD (Badan Perwakilan Desa);
4. Tokoh desa/kelurahan;
5. Perwakilan organisasi sosial, perempuan, kepemudaan dan profesi (kelompok tani, nelayan);

6. Perwakilan masyarakat difabel;
7. Perwakilan masyarakat umum dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dan laki-laki; dan
8. Perwakilan kelompok/organisasi penanggulangan bencana di Desa/Kelurahan.

B. Fasilitator

Tenaga fasilitator Penilai berperan sebagai Fasilitator dalam FGD. Fasilitator membantu peserta memahami pertanyaan-pertanyaan agar dapat memberikan jawaban sesuai kondisi desa/kelurahan. Jawaban-jawaban setiap pertanyaan merupakan kesepakatan hasil diskusi para peserta, bukan pendapat pribadi fasilitator.

C. Susunan Acara Sekurang – Kurangnya Terdiri Atas :

1. Doa bersama;
2. Pembukaan oleh Kades/Lurah;
3. Penjelasan tujuan, komponen dan hasil kegiatan oleh fasilitator;
4. Diskusi menjawab pertanyaan penilaian ketangguhan;
5. Penandatanganan berita acara FGD penilaian ketangguhan bencana;
6. Penutupan

D. Proses

1. Setelah penjelasan tujuan, dan hasil yang diharapkan, fasilitator penilai memandu diskusi dengan membacakan keterangan dan pertanyaan-pertanyaan serta menghimpun jawaban beserta bukti pendukung.
2. Sebelum menjawab, fasilitator penilai harus memastikan peserta memahami pertanyaan-pertanyaan setiap indikator dengan memberikan keterangan pengantar dan penjelasan.
3. Hasil jawaban pada kelompok pertanyaan di tiap-tiap indikator dilengkapi dengan bahan bantu penilaian sebagai verifikasi untuk membantu membuktikan bahwa jawaban pertanyaan tersebut telah terpenuhi. Bukti verifikasi dapat berupa file softcopy (word/excel) atau PDF hasil scan.

4. Jawaban yang telah terbukti, dimasukkan ke dalam Perangkat Analisa Penilaian Ketangguhan Desa. Jawaban 'YA', diisi dengan angka 1, jawaban 'TIDAK' diisi dengan angka 0.
5. Setelah semua jawaban terisi, dilakukan penghitungan posisi ketangguhan. Tingkat ketangguhan desa/kelurahan dalam menghadapi bencana dibagi ke dalam 3 kriteria, yaitu:
 - a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama : >83,33
 - b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya : 58,33 – 83,33
 - c. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama : <58,33
6. Setelah mengetahui posisi ketangguhan desa, fasilitator penilai memandu untuk merancang aksi-aksi yang dibutuhkan untuk meningkatkan ketangguhan desa. Terdapat 2 jenis rancangan aksi, yaitu aksi prioritas dan aksi non prioritas.
 - a. Aksi prioritas adalah aksi yang perlu dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia di desa/kelurahan.
 - b. Aksi non prioritas dapat tidak dilaksanakan, sebelum aksi prioritas dilaksanakan bila sumber daya desa/kelurahan terbatas.
7. Periode perencanaan aksi adalah 3-5 tahun, tergantung kesepakatan kelompok diskusi.

E. Alat dan Bahan

Laptop, LCD, pengantar FGD (ppt), fotokopi daftar pertanyaan sebanyak jumlah peserta.

V. PELAPORAN

Tenaga fasilitator penilai DESTANA melaporkan hasil penilaian kepada BPBD Provinsi NTB dan BNPB.

A. Laporan Kepada BPBD NTB

Laporan kepada BPBD NTB sekurang-kurangnya memuat:

1. Narasi singkat proses penilaian;
2. Hasil penilaian dan bukti-bukti verifikasi dan
3. Lampiran: Daftar hadir, Berita acara, dokumentasi foto.

B. Laporan Kepada BNPB

Laporan hasil penilaian DESTANA dan bukti-bukti verifikasi dikirimkan ke BNPB menggunakan platform online/digital yang berlaku dan diakui oleh BNPB.

LAMPIRAN

1. Format Daftar Hadir

| No | Nama | Unsur/Perwakilan | Jabatan/ Posisi | Alamat | Tanda Tangan |
|----|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| | dst | | | | |

2. Format Penilaian DESTANA

Format Penilaian DESTANA akan merujuk berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 8357:2017 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana yang dikontekstualisasikan dengan kebutuhan lokal Provinsi NTB.

a. Daftar Nama Fasilitator penilai/Penilai

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Lokasi Penilaian :

Waktu :

| No. | Nama | Jabatan/Institusi | Tanda Tangan |
|-----|------|-------------------|-----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

b. Komponen Penilaian DESTANA

| No. | Komponen | Indeks Komponen | Indeks Desa Tangguh | Tingkat Ketangguhan Desa |
|-----|--|-----------------|---------------------|--------------------------|
| 1. | Kualitas dan Akses Layanan Dasar | | | |
| 2. | Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana | | | |
| 3. | Pencegahan dan Mitigasi | | | |
| 4. | Kesiapsiagaan Darurat | | | |
| 5. | Kesiapsiagaan Pemulihan | | | |

3. Format Berita Acara.

BERITA ACARA

PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA DESA DAN KELURAHAN

Pada hari tanggal bulan tahun telah diselenggarakan **Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan** yang dihadiri pemangku kepentingan di tingkat desa sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah dilakukan proses Diskusi Kelompok Terfokus (*FGD-Focus Group Discussion*) Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan di Desa Kecamatan Kabupaten, selanjutnya seluruh peserta kegiatan menyepakati beberapa hal yang menjadi ketetapan dalam kegiatan ini yaitu :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan disahkan dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Berita Acara

| No | Nama | Alamat | Tanda Tangan |
|----|------|--------|--------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | dst. | | |